

**PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK
TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK SEBELUM
DAN SETELAH *SUNSET POLICY*
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta-Matraman)**

***THE INFLUENCE OF ADDITIONAL REGISTERED TAX
PAYERS TO THE TAX RECEIVED BEFORE AND AFTER
SUNSET POLICY
(Study at Jakarta Matraman Small Tax Payers Office)***

**RINAWATI
8335062792**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

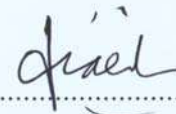
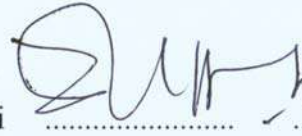

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2010**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi,



Dra. Nurahma Hajat, M.Si
NIP. 195310021985032001

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. <u>Dian Citra Aruna, S.E., M.Si.</u> NIP. 19760908199903201	Ketua		23 Juni 2010
2. <u>Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak</u> NIP. 197706172008122001	Sekretaris		22 Juni 2010
3. <u>Dra. Etty Gurendrawati, M.Si., Ak</u> NIP. 196803141992032002	Penguji Ahli		23 Juni 2010
4. <u>Tresno Eka Jaya, S.E., M. Ak</u> NIP. 1974110520060041001	Pembimbing I		23 Juni 2010
5. <u>M. Yasser Arafat, S.E., Akt., M.M</u> NIP. 197104132001121001	Pembimbing II		23 Juni 2010

Tanggal Lulus : 17 Juni 2010

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, 8 April 2010

Yang Membuat Pernyataan,

R i n a w a t i

NIM. 8335062792

ABSTRAK

Rinawati. 2010. Pengaruh Penambahan Jumlah WP Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah Sunset Policy (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman). Jakarta : Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari penambahan jumlah WP terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman dan pelaksanaan sunset policy terhadap penerimaan pajak, khususnya PPh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitiannya adalah KPP Pratama Jakarta Matraman. Populasi yang digunakan adalah jumlah WP terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman beserta penerimaan PPh-nya. Sedangkan, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu jumlah keseluruhan WP baru terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman beserta penerimaan PPh-nya dalam periode waktu Januari 2007 hingga Maret 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data per bulan yang diurutkan berdasarkan periode waktunya (*time series*). Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel penambahan jumlah WP terdaftar (variabel X_1), penerimaan PPh (variabel Y), dan sunset policy (variabel *dummy* / variabel X_2). Data tersebut diperoleh dari Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Matraman, melalui aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang terdapat pada intranet DJP (portal DJP), dan basis data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Teknik analisis data menggunakan analisis korelasional dan analisis regresi linier berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, penambahan jumlah WP terdaftar dan sunset policy berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh (nilai F -hitung $5,489 > F$ -tabel $3,266$), dengan nilai koefisien determinasi sebesar $0,191$ atau sebanyak $19,1\%$ variabel penerimaan PPh dijelaskan oleh variabel bebas jumlah WP baru dan *dummy* sunset policy, sisanya sebesar $80,9\%$ dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Sedangkan, secara parsial, penambahan jumlah WP tidak memberikan hasil yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan PPh (tidak berpengaruh signifikan) dengan t -hitung $0,344 < t$ -tabel $2,0294$ dan koefisien korelasi sebesar $0,214$ (korelasi lemah) dengan p -value pada kolom sig.(2-tailed) $0,192 > 0,05$ level of significant (α). *Dummy* sunset policy berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh dengan nilai t -hitung $2,973 > t$ -tabel $2,0294$ dan koefisien korelasi sebesar $0,481$ (korelasi kuat) dengan nilai p -value pada kolom sig.(2-tailed) $0,002 < 0,05$ level of significant (α). Sedangkan, jumlah WP baru dan *dummy* sunset policy berkorelasi lemah dengan nilai koefisien korelasinya sebesar $0,346$. Nilai p -value pada kolom sig.(2-tailed) $0,031 < 0,05$ level of significant (α).

Kata kunci : penambahan jumlah WP terdaftar, sunset policy, penerimaan PPh, KPP Pratama Jakarta Matraman

ABSTRACT

Rinawati. 2010. The Influence of Additional Registered Tax Payers to the Tax Received Before and After Sunset Policy (Study at Jakarta Matraman Small Tax Payers Office). Jakarta: Study Program of SI Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economic, the State University of Jakarta

This script explain about the influence that is appearance from additional of tax payers who registered at Jakarta Matraman Small Tax Payers Office and implementation of sunset policy to the tax receive, especially income tax. This research is the quantitative research with its object is Jakarta Matraman Small Tax Payers Office. The population which is used in this research are the new tax payers who registered at Jakarta Matraman Small Tax Payers Office and also the received of income taxes. Whereas, the sample in this research that is sum of all new tax payers at Jakarta Matraman Small Tax Payers Office and then with the received of income taxes within period of January 2007 until March 2010. Data that is used in this research is data per month, which is arranged based time period (time series). This research use three variables, that are the additional registered of tax payers variable (X1 variable), the received of income taxes (Y variable), and sunset policy (dummy variable or X2 variable). Those data are gotten from PDI Section at Jakarta Matraman Small Tax Payers Office, through the application of Country Received Module (MPN) which are there at DJP intranet (DJP portal), and database at the System of Information Direktorat Jemderal Pajak (SIDJP). The techniques of data analysis use correlation analysis and multiple linier regression analysis

The result of this research is about the simultaneously, the additional of registered tax payers and sunset policy has the significant influence to the received of income taxes (the value of F-count 5,489 > F-table 3,266), with the value of determination coefficient as 0,191 or about 19, 1 % of income taxes variable was explained by independent variable of new taxpayers and dummy sunset policy, its residual about 80,9% was explained by the other variables. Whereas, partially, the additional of tax payers don't give the significant result to increase income tax received (don't significant influenced) with t-count 0,344 < t-table 2,0294 and correlation coefficient as 0,214 (low correlation) with p-value at the column of sig.(2-tailed) 0,192 > 0,05 level of significant (α). Dummy sunset policy is influenced significant to the income tax received about the value of t-count 2,973 > t-table 2, 0294 and correlation coefficient as 0,481 (strong correlation) with p-value at column sig.(2-tailed) 0,002 < 0,05 level of significant (α). However, sum of new tax payers and dummy sunset policy is low correlated with the value of correlation coefficient as 0,346. P-value at column sig.(2-tailed) 0,031 < 0,05 level of significant (α).

Keywords : additional registered tax payers, sunset policy, the received of income taxes, Jakarta Matraman Small Tax Payers Office

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah *Sunset Policy* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman)" dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, tahun 2010 ini. Sesuai dengan judulnya, isi yang terkandung dalam Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang Penulis lakukan di KPP Pratama Jakarta Matraman. Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari jumlah Wajib Pajak baru terhadap penerimaan pajak saat sebelum dan setelah pelaksanaan *Sunset Policy*, termasuk tingkat keberhasilan pelaksanaan *sunset policy* dalam meningkatkan penerimaan PPh. Sistematika penyusunan Skripsi ini disajikan dalam bentuk yang runtut dan mudah dipahami, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu perpajakan.

Akhir kata, tidak lupa ucapan terimakasih, terutama kepada :

1. Kedua orangtua Penulis (mama dan papa), yang senantiasa memberikan dukungannya baik moril maupun materiil pada Penulis
2. Ibu Dra. Nurahma Hajat, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UNJ.
3. Bapak M. Yasser Arafat, S.E., Akt., M.M. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi, (sekaligus Pembimbing Dua), dan Bapak Tresno Eka Jaya, S.E., M.Ak. sebagai

Pembimbing Satu, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukannya kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Dian Citra Aruna, S.E., M.Si (sekaligus Ketua Penguji), dan juga kepada Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dalam sidang Skripsi ini, dan juga memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan Skripsi ini
5. Bapak Kepala KPP Pratama Jakarta Matraman, Bapak Hari Santoso, yang telah mengizinkan Penulis untuk PKL sekaligus Skripsi pada kantor pimpinan beliau
6. Bapak Kepala Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Matraman, Bapak Mokh. Solikhun, S.E., Ak., M.T., M.M., yang telah memberikan arahan dalam memperoleh data yang diperlukan dan penjelasan mengenai data tersebut
7. Bapak Trio Sutarto sebagai *Operator Console* (OC) Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Matraman, yang telah memberikan bantuan dalam mencari data yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini
8. Seluruh pegawai staf PDI KPP Pratama Jakarta Matraman yang tidak disebutkan satu persatu, yang juga tidak bosan-bosannya memberikan bantuan pada Penulis
9. Teman-teman Akuntansi FE UNJ angkatan 2006, terutama teman-teman Akuntansi Reguler, atas dukungan, kebersamaan, & semangatnya selama ini

Dan juga semua pihak lainnya yang telah membantu demi terselesaikannya Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan seluruh masyarakat. Sekian, Wassalam

Jakarta, Juni 2010

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Originalitas.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS.....	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.2 Review Penelitian Relevan.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
2.4 Hipotesis.....	38

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	39
3.2 Metode Penelitian.....	40
3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian	41
3.4 Metode Penentuan Populasi atau Sampel.....	42
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	43
3.6 Metode Analisis.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Deskripsi Unit Analisis / Observasi.....	53
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Keadaan Per 1 Januari 2008.....	57
Tabel 4.2 Jumlah PKP per Jenis Usaha KPP Pratama Jakarta Matraman Per 01 Januari 2008.....	58
Tabel 4.3 Perkembangan WP Terdaftar Menurut Jumlah SPT.....	58
Tabel 4.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh.....	59
Tabel 4.5 Data Penelitian.....	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data pada SPSS Setelah Transformasi Data.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	66
Tabel 4.9 Hasil Autokorelasi.....	67
Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Korelasi.....	69
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi.....	71
Tabel 4.13 Output SPSS Koefisien Determinasi.....	72
Tabel 4.14. Output SPSS Uji Simultan F-test.....	73
Tabel 4.15 Output SPSS Uji Parsial t-test.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Alur (<i>Flow Chart</i>) Permohonan Pendaftaran NPWP.....	23
Gambar 2.2 <i>Flowchart</i> Pendaftaran Permohonan NPWP Melalui E-Reg.....	26
Gambar 2.3 Flowchart Proses Pengukuhan PKP.....	28
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Matraman.....	54
Gambar 4.2 Pusat perdagangan (<i>business centre</i>) Pasar Burung Pramuka Jalan Pramuka Raya – Kec. Matraman.....	56
Gambar 4.3 Kurva Histogram Distribusi Normal.....	64
Gambar 4.4 Kurva Normal P-Plot Variabel Y dan Variabel X_1	65
Gambar 4.5 Kurva Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin PKL / Magang Sekaligus Observasi dari Kantor Pusat DJP.....	84
Lampiran 2 Surat Keterangan PKL / Magang Sekaligus Observasi.....	85
Lampiran 3 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS).....	86
Lampiran 4 Output Perhitungan SPSS.....	87
Lampiran 5 Data Penerimaan Pajak Tahun 2007- Maret 2010.....	91
Lampiran 6 Data Jumlah WP Baru Terdaftar Tahun 2007 hingga Maret 2010.....	92
Lampiran 7. Data <i>Sunset Policy</i>	96
Lampiran 8. Tabel Uji Durbin-Watson.....	97
Lampiran 9 Tabel Uji F.....	98
Lampiran 10 Tabel Uji Parsial t-test.....	99

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Nama	Jabatan	Tandatangan
<u>Tresno Eka Jaya, S.E, M. Ak</u> NIP. 1974110520060041001	Pembimbing Satu
<u>M. Yasser Arafat, S.E., Akt., M.M.</u> NIP. 197104132001121001	Pembimbing Dua

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

M. Yasser Arafat, S.E., Akt., M.M.
NIP. 197104132001121001

Dian Citra Aruna, S.E., M.Si.
NIP. 19760908199903201

Tanggal Seminar : 2 Juni 2010

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tandatangan
<u>Tresno Eka Jaya, S.E, M. Ak</u> NIP. 1974110520060041001	Pembimbing Satu
<u>M. Yasser Arafat, S.E., Akt., M.M.</u> NIP. 197104132001121001	Pembimbing Dua

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

M. Yasser Arafat, S.E., Akt., M.M.
NIP. 197104132001121001

Dian Citra Aruna, S.E., M.Si.
NIP. 19760908199903201

Tanggal Ujian : 17 Juni 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cara untuk menciptakan anggaran pendapatan Negara yang sehat, adalah dengan mengoptimalkan penggalan penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat diharapkan untuk membiayai pembangunan. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang diharapkan terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian serta stabilitas politik suatu negara. Menurut data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Kerja panitia Anggaran DPR RI tanggal 12 Februari 2009, selama jangka waktu empat tahun, yaitu mulai tahun 2005 hingga tahun 2008, realisasi penerimaan Negara dari sector pajak dalam kurun waktu tersebut mengalami kenaikan rata-rata 23,8 % per tahun. Sedangkan untuk tahun 2008 itu sendiri mengalami kenaikan sebesar 34,2 %, yang terdiri dari pajak Nonmigas sebesar 29,6 %, pajak Migas 75 %, serta penerimaan pajak yang berasal dari bea dan cukai sebesar 33,4 %. Tingginya realisasi penerimaan pajak ini didukung oleh sektor perkebunan dan pertambangan, tingginya impor barang modal, intensifikasi perpajakan, dan *sunset policy*.

Meskipun penerimaan pajak senantiasa mengalami kenaikan, kinerja perpajakan Indonesia relatif masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* yang dimiliki Indonesia diantara negara-negara ASEAN. Seperti yang dikutip oleh *Detik Finance*,

rata-rata rasio pajak yang dimiliki Indonesia semenjak 1985-1999 adalah 11,31%, jauh di bawah Singapura (22,24 %), Malaysia (20,17 %), Thailand (17,28 %) dan Filipina (14 %). Saat undang-undang Perpajakan direvisi kembali pada tahun 1994, rasio pajak yang dicapai juga hanya berkisar 12 %. Yang lebih memprihatinkan, rasio pajak tahun 1997 / 1998, 1998 / 1999 dan 1999 / 2000 terus mengalami penurunan menjadi 11,4 %, 9,7 % dan 7,7 %.

Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB), yang menunjukkan besarnya bagian PDB yang bisa ditarik kembali sebagai pajak oleh negara. *Tax ratio* juga bisa menjadi suatu ukuran untuk melihat seberapa produktif sistem perpajakan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan negara. Semakin tinggi (rendah) nilai *tax ratio*, akan menjadi ukuran semakin maju (rendah) sistem perpajakan negara tersebut. Rendahnya *tax ratio* ini juga menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) menganut prinsip *self assessment system* (yaitu Wajib Pajak menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang). Dalam pelaksanaannya, sistem ini memerlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari Wajib Pajak yang bersangkutan, mulai dari pendaftaran, penghitungan besarnya pajak yang terutang, penyeteroran, sampai dengan pengisian dan pelaporan SPT. Fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat kita adalah rendahnya tingkat kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat ini, tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya saja ketidaktahuan mengenai sistem dan aturan perpajakan yang berlaku, atau mungkin

ada juga mereka yang masih enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi penghasilan yang seharusnya mereka terima, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengeluarkan suatu kebijakan baru yang bernama *sunset policy*, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PPh, sekaligus mendorong kejujuran dan keterbukaan dari Wajib Pajak (WP), serta untuk membangun kesadaran dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak.

Sunset policy ini merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada WP untuk menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang. WP yang memanfaatkan *sunset policy* ini akan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang berupa penghapusan sanksi bunga. Salah satu indikator dari keberhasilan *sunset policy* ini, diantaranya adalah banyaknya jumlah WP yang mendaftarkan dirinya secara sukarela. Karena, banyaknya jumlah WP yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Walaupun, sebenarnya banyaknya jumlah WP tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya penerimaan PPh dapat meningkat, terutama untuk periode-periode selanjutnya. Logikanya, setiap terjadi penambahan jumlah WP, maka akan diiringi dengan penambahan jumlah penerimaan pajak yang signifikan. Penambahan jumlah WP yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada masa-masa berikutnya. Selanjutnya, *Sunset policy* ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan PPh. Karena, berhasil tidaknya pelaksanaan *sunset policy* ini dalam menghimpun penerimaan pajak,

tergantung dari sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, Penulis mencoba meneliti mengenai “Pengaruh Penambahan Jumlah WP Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Saat Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Matraman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka Skripsi ini mencoba untuk menjawab beberapa permasalahan (*problem statement*) berikut :

- a. Apakah jumlah WP baru yang terdaftar akan memberikan pengaruh signifikan terhadap besarnya penerimaan PPh di KPP Pratama Jakarta Matraman?
- b. Apakah pelaksanaan *sunset policy* ini juga akan memberikan pengaruh signifikan bagi peningkatan penerimaan PPh pada KPP Pratama Jakarta Matraman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain : untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penambahan jumlah WP terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman dan pelaksanaan *sunset policy* terhadap penerimaan pajak, khususnya PPh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik bagi akademis, maupun manfaat praktis bagi instansi terkait. Beberapa manfaat tersebut antara lain :

- a. Manfaat penelitian ini bagi akademis dan dunia pendidikan, yaitu :
- 1) Sebagai sarana pengembangan ilmu di bidang perpajakan,
 - 2) Manfaat lainnya, yaitu untuk memperkaya literatur, sebagai sumber informasi dan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang telah ada
 - 3) Di samping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran perpajakan bagi masyarakat
- b. Manfaat penelitian ini bagi instansi terkait, yaitu bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman atau bagi instansi lain yang terkait, antara lain : sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangan dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan-kebijakan selanjutnya, untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, khususnya PPh pada masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Untuk mempermudah pemahaman dan analisis, maka berikut ini akan dibahas beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya teori dasar perpajakan, teori Pajak Penghasilan (PPH), mengenai *sunset policy*, pendaftaran Wajib Pajak, dan juga penerimaan pajak

2.1.1 Teori Dasar Perpajakan

2.1.1.1. Definisi Pajak

Mengenai definisi perpajakan, terdapat beberapa definisi dari beberapa sumber, diantaranya :

- a. Definisi pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, seperti yang dikutip oleh Mohammad Zain¹, mengatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

¹ Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan edisi 3*. Bandung : Penerbit Salemba Empat, hlm. 11

tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Definisi tersebut dikoreksi menjadi : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

- c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. (Amerika Serikat)², mengatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”
- d. Prof. Dr. P J A. Adriani (Eropa)³, mengemukakan ”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”
- e. Definisi lainnya, yaitu menurut Prof. Dr. MJH. Smeets⁴ menyatakan bahwa ”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang

² *Ibid*

³ *Ibid.*, hlm. 10

⁴ Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, hlm. 3

dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Setelah kita melihat berbagai definisi seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ”Pajak merupakan iuran atau pungutan yang diberikan dari masyarakat kepada negara dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang”

2.1.1.2. Klasifikasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 5-6), pajak dapat dikelompokkan antara lain, sbb :

a. Menurut golongannya, terdiri dari :

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut sifatnya, terdiri dari :

- 1) Pajak subyektif, ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Obyektif, ialah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

c. Menurut lembaga pemungutnya, terdiri dari :

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN & PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terbagi menjadi :
 - a) Pajak Propinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Kabupaten / Kota, contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.1.1.3. Fungsi, Syarat, Prinsip, dan Sistem Pemungutan Pajak

Beliau juga mengemukakan mengenai fungsi, syarat, dan sistem pemungutan pajak, diantaranya :

a. Fungsi Pajak, terdiri dari :

- 1) Fungsi budgetair, yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- 2) Fungsi regulierend (mengatur), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
 - b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
 - c) Tarif pajak ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor produk Indonesia ke luar negeri
- 3) Fungsi stabilitas⁵, yaitu pajak dapat menstabilkan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara antara lain menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga dan pengendalian inflasi, mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat⁶.

b. Syarat Pemungutan Pajak, diantaranya :

- 1) Adil, yakni undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang maksudnya, pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan, yakni dengan memberikan hak bagi para Wajib

⁵ Terdapat pada artikel online berjudul “Sejarah Perpajakan di Indonesia (Indonesian Tax History)”, Sumber : <http://wijiraharjo.wordpress.com/2007/12/10/sejarah-perpajakan-indonesia-indonesian-tax-history/>, diakses 2 Februari 2010

⁶ *ibid*

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan banding kepada pengadilan pajak

- 2) Yuridis, maksudnya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
- 3) Ekonomis, yaitu pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian, baik kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
- 4) Finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien, yakni biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
- 5) Sederhana, maksudnya sistem pemungutan pajak harus sederhana sehingga akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

c. Sistem Pemungutan Pajak, terbagi menjadi :

- 1) *Official Assessment System*, ialah suatu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus
- 2) *Self Assessment System*, ialah suatu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri
- 3) *Withholding Taxes*, adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut pajak terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan Wajib Pajak⁷. Dalam hal ini, jumlah pajak yang telah dipotong tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu. Istilah *withholding taxes* ini biasa disebut dengan Wajib Pungut (WAPU)

⁷ Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan edisi 3*. Jakarta : Granit, hlm.109-110

2.1.1.4. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Yang dapat dijadikan dasar pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, diantaranya dikemukakan oleh Mardiasmo (2006 : 3-4), sbb:

- a. Teori asuransi, mengatakan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Karena itu, pajak diibaratkan sebagai premi asuransi untuk memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Walaupun demikian, teori ini memiliki kelemahan, antara lain tidak adanya imbalan yang akan diberikan oleh negara jika tertanggung dalam hal ini Wajib Pajak menderita resiko, menurut Safri Nurmantu (2005 : 77). Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa adanya imbalan dalam pajak sebenarnya bertentangan dengan definisi pajak itu sendiri

- b. Teori kepentingan, menyatakan bahwa pembagian pajak didasarkan atas kepentingan setiap orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

Dalam hal ini, fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya tidak berarti negara memilih-milih dalam melindungi rakyatnya, misalnya jika terjadi suatu bencana, hanya mereka yang sudah membayar pajak saja yang diselamatkan, sedangkan yang lain tidak. Hal ini merupakan kelemahan dari teori ini⁸

- c. Teori daya pikul, maksudnya beban pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang, dengan memperhatikan unsur obyektif (misalnya melihat besarnya kekayaan dan penghasilan yang dimiliki), dan unsur subyektif (misalnya memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi)

⁸ *Ibid.*, hlm. 77

- d. Teori bakti, menyebutkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Rakyat yang berbakti ialah rakyat yang menyadari pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban
- e. Teori asas daya beli, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara, yang selanjutnya nanti akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan untuk kepentingan seluruh masyarakat
- f. Teori pembangunan⁹, maksudnya dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur, dan lebih sejahtera.

2.1.2. Pajak Penghasilan (PPh)

2.1.2.1. Pengertian Dasar PPh

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu masa pajak

2.1.2.1.1 Sejarah PPh

Secara garis besar, sejarah PPh di Indonesia seperti berikut ini

a. UU Pajak Pendapatan 1944 (Ordonansi PPd 1944).

Pajak Pendapatan tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 1983, merupakan produk buatan Belanda yang dibuat di Australia. Tarif pajak yang berlaku ada 2 macam, yaitu :

- a) Tarif umum, ada 19 lapisan tarif progresif, tarif marginal 5 % - 50 %.
- b) Tarif khusus, yang berlaku bagi pendapatan tertentu sebesar 10 %

⁹ *Ibid.*, hlm 79

Pendapatan yang dikenakan pajak adalah Pendapatan Bersih, yaitu Pendapatan yang dikurangi Batas Pendapatan Bebas Pajak (BPBP). Besarnya BPBP setiap tahun ditentukan menurut Keputusan Menteri Keuangan

b. Pajak Perseroan (PPs).

Pajak Perseroan yang diatur melalui ordonansi PPs. 1925, juga merupakan produk hukum buatan Belanda jauh sebelum kemerdekaan berakhir dilaksanakan 31 Desember 1983. Untuk mengikuti perkembangan zaman dan situasi, terhadap ordonansi PPs. ini sering dilakukan perubahan dan penyempurnaan, di mana perubahan terakhir dan mendasar adalah melalui UU No.8 Tahun 1970, Tentang Perubahan & Penyempurnaan Ordonansi PPs. 1925, yang antara lain berisi ketentuan-ketentuan mengenai perangsang penanaman dan berbagai bentuk fasilitas perpajakan dalam rangka menampung kegiatan Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967, serta Penanaman Modal Dalam Negeri –UU No. 6 Tahun 1968.

c. Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royalty (PBDR)-UU PBDR 1970

Ordonansi PPd. 1944, dan Ordonansi PPs. 1925, tidak semua orang dan badan yang bertempat tinggal di luar Indonesia dapat dikenakan pajak walaupun mereka memperoleh / menerima pendapatan dari sumber-sumber yang berasal atau datang dari Indonesia, maka untuk menggali potensi pajak dari sumber-sumber tersebut, lahirlah Perpu No.12 Tahun 1959, yang mengatur pengenaan pajak atas deviden yang dibayarkan ke luar negeri dengan sistem "*withholding tax* ", yang kemudian lebih terkenal dengan nama Undang-Undang Pajak Deviden 1959.

Dengan terbukanya perekonomian Indonesia terhadap pihak luar, maka banyak investor dari luar negeri yang melakukan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, membuka kegiatan / usaha / partisipasi ke Indonesia sehingga pendapatan bukan hanya dalam bentuk Deviden tapi telah berkembang dalam bentuk lain seperti bunga, dan royalty. Oleh karena itu UU Pajak Deviden diperluas objeknya, dan diganti dengan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royalti (UU No. 10 Tahun 1970).

d. Menghitung Pajak Sendiri (MPS), dan Menghitung Pajak Orang lain (MPO)

Sistem ini diterapkan melalui UU No. 8 Tahun 1967, juncto PP No. 11 Tahun 1967. MPS-MPO merupakan tatacara (sistem) dari pelaksanaan pemenuhan Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan, termasuk juga Pajak Kekayaan, dan bukan jenis pajak baru. Dengan sistem ini, WP diberi kepercayaan untuk Menghitung, Menyetor, serta Melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, selama tahun berjalan, walaupun pada akhir tahun besarnya pajak terutang kembali ditetapkan oleh Fiskus secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Rampung, sehingga dapat disebut sistem *semi self-assessment*. Di lain pihak sistem MPO, adalah Menghitung, Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Orang lain, apabila berhubungan dengan pihak yang ditunjuk oleh Kantor Pajak sebagai pemungut. Kepada yang kena pungut oleh pemungut diberikan bukti pungutan yang dapat digunakan oleh yang bersangkutan sebagai pengurang pajak terutang pada akhir tahun. Sistem MPS-MPO inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem *Self-Assessment* pada saat sekarang.

e. Pembaharuan Pajak (Tax-Reform) awal Tahun 1980-an.

Adanya tuntutan yang mendesak, maka perlu diadakan pembaharuan secara menyeluruh dari system perpajakan dalam rangka memenuhi tuntutan APBN yang makin tahun semakin meningkat, pemerintah melaksanakan *Tax-Reform* secara menyeluruh di bidang perpajakan, dengan tetap memperhatikan landasan berpikir undang-undang perpajakan yang telah ada seperti PPd, PPs, Pajak Kekayaan, PBDR, IPEDA (pada waktu itu), serta sistem MPS-MPO yang masih bersifat semi *Self-Assessment*.

Selama masa *tax reform* ini, maka undang-undang yang dikeluarkan adalah :

- a) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1984, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-PPn.BM).

Tiga UU ini kemudian disusul dengan 2 UU lagi yaitu ;

- a) Undang-Undang No.12 Thn 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b) Undang –Undang No. 13 Tahun 1985, Tentang Bea Meterai (BM).

Seluruh UU yang disebut diatas, kecuali UU Bea Meterai (UU No.13), telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan

2.1.2.1.2 Dasar Hukum PPh

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.2.2. Obyek PPh

Yang menjadi objek PPh, tentunya adalah penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh no. 36 th. 2008, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara umum, pengertian penghasilan (yang terdapat dalam UU PPh no. 36 th. 2008 di atas), dapat dikelompokkan ke dalam empat macam berdasarkan sumber penerimaannya, yaitu :

- a. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
- b. Penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan yang berasal dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, keuntungan penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok penghasilan di atas, seperti : keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, hadiah undian

2.1.2.3. *Subyek PPh*

Yang menjadi subyek pajak adalah :

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan, terdiri dari BUMN / BUMD, PT, CV, firma, kongsi, yayasan, perkumpulan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi sejenis, lembaga, atau badan lainnya,
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.1.3. *Sunset Policy*

Sunset policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. *Sunset policy* ini diberlakukan dalam jangka waktu terbatas, yakni selama 14 bulan yang berlangsung mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008, yang kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 / 2008 tentang *Sunset Policy* diperpanjang hingga 28 Februari 2009.

Tujuan dari pelaksanaan *sunset policy* ini diantaranya adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Sesuai dengan ketentuan, *sunset policy* ini dapat dimanfaatkan oleh :

1. Wajib Pajak baru, yakni Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP dan secara sukarela mendaftarkan untuk memperoleh NPWP pada tahun 2008, dan menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya.
2. Wajib Pajak lama, yakni Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak lama, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.

Cara penyampaian atau pembetulan SPT, antara lain :

1. Menggunakan form SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan.
2. Menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk & setiap lampirannya.
3. Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi menggunakan SSP.
4. Melampirkan SSP lembar-3 pada SPT Tahunan PPh.
5. Disampaikan ke KPP tempat terdaftar.

Dalam *sunset policy* ini, WP diberi kepercayaan penuh untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan atau informasi yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP

Orang Pribadi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, kecuali:

1. Terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar; atau
2. SPT Tahunan PPh menyatakan lebih bayar atau rugi (terhadap SPT tahunan WP OP yang disampaikan)

2.1.4. Pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran merupakan serangkaian langkah awal sebelum seseorang atau organisasi dapat dikenakan hak dan kewajiban perpajakan. Proses pendaftaran biasanya ditandai dengan : pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Penghasilan, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Pertambahan Nilai, dan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) untuk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Terkait dengan hal tersebut, berikut ini akan dibahas yang berkaitan dengan pemberian NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan serta pengukuhan PKP

2.1.4.1 Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya¹⁰. Karena pentingnya NPWP tersebut, yaitu sebagai identitas Wajib Pajak, maka setiap WP yang melaksanakan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu wajib memiliki NPWP.

NPWP diberikan kepada WP Orang Pribadi atau Badan yang berdasarkan UU PPh dikenai kewajiban perpajakan baik kewajiban perpajakan atas dirinya sendiri ataupun kewajiban memungut atau memotong PPh pihak lain (*withholding tax*).

NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode WP dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

Dengan kode untuk kepala nomor :

00 untuk bendaharawan pemerintah pusat / daerah

01 untuk wajib pajak badan, nomor cadangan 02 dan 03

04 dan 06 untuk wajib pajak orang pribadi, nomor cadangan 07, 08, 09

05 untuk wajib pajak pegawai negeri sipil

Kepala nomor

01.234.567.8-999.000

Kode WP Kode KPP Kode cabang

Mengenai tatacara pendaftaran NPWP ini terdiri dari dua macam, yaitu pendaftaran secara manual (sesuai dengan Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-161 / PJ. / 2001 Tanggal 21 Februari 2001 sebagaimana yang telah disempurnakan dengan PER-160 / PJ / 2007 yang telah disempurnakan dengan PER-44 / PJ / 2008), dan pendaftaran

¹⁰ Pengertian NPWP menurut pasal 1 angka 6 UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) no.28 th.2007

secara online melalui e-registration (sesuai dengan Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-173 / PJ. / 2004 tanggal 29 November 2004 dan SE Dirjen Pajak Nomor: SE-02 / PJ. / 2005 Tanggal 19 Januari 2005). Berikut ini dijelaskan satu persatu :

- a. NPWP orang pribadi, yaitu NPWP yang wajib dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) perorangan / pribadi. Ketika mengajukan permohonan pembuatan NPWP, maka Wajib Pajak tersebut harus memenuhi dan melampirkan beberapa persyaratan administrasi berikut ini

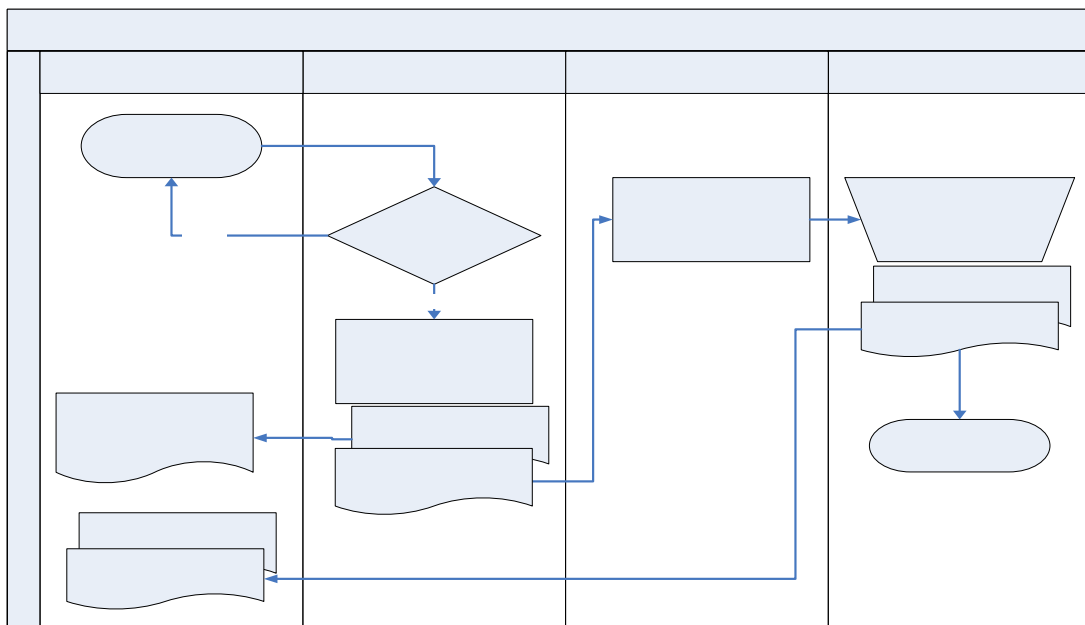
Persyaratan Administrasi¹¹:

- 1) Persyaratan NPWP untuk WP Orang Pribadi (WP OP) yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (karyawan) :
 - (a) Fotocopy KTP / Kartu Keluarga / SIM / Paspor;
 - (b) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
 - (c) isi formulir aplikasi & ditandatangani
 - (d) surat kuasa bila dikuasakan
 - (e) kontrak kerja dengan perusahaan Indonesia khusus untuk WP OP luar negeri karyawan
- 2) Persyaratan NPWP untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - (a) Fotocopy KTP / Kartu Keluarga / SIM / Paspor
 - (b) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

¹¹ sesuai KEP - 161/PJ/2001 jo PER -160/PJ/2007 dan SE - 37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007

- (c) Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
- (d) isi formulir aplikasi & ditandatangani
- (e) surat kuasa bila dikuasakan

Setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, maka proses pembuatan NPWP ini jika dibuat bagan alurnya (*flow chart*) terlihat seperti berikut



Gambar 2.1 Bagan Alur (*Flow Chart*) Permohonan Pendaftaran NPWP

Sumber : Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-37/PJ/2007

- b. NPWP badan, yaitu NPWP yang wajib dimiliki oleh WP berbentuk badan atau perusahaan / organisasi. Pembuatan NPWP badan ini, prosesnya sama dengan proses pada pembuatan NPWP orang pribadi seperti terlihat pada gambar 2.1 di atas. Jangka waktu penyelesaiannya juga sama, perbedaannya hanya pada persyaratan administrasi yang harus dilampirkan, yaitu :

Tidak

Berkas Lengkap
atau Tidak ?

- 1) Fotocopy Akte Pendirian & perubahan terakhir / surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
 - 2) Fotocopy KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
 - 4) isi formulir aplikasi & ditandatangani
 - 5) surat kuasa bila dikuasakan
- c. Secara elektronik melalui e-registration

Baik WP OP maupun WP badan, keduanya bisa melakukan permohonan pendaftaran NPWP secara elektronik melalui e-reg yang prosesnya akan dijelaskan di bawah ini, yaitu :

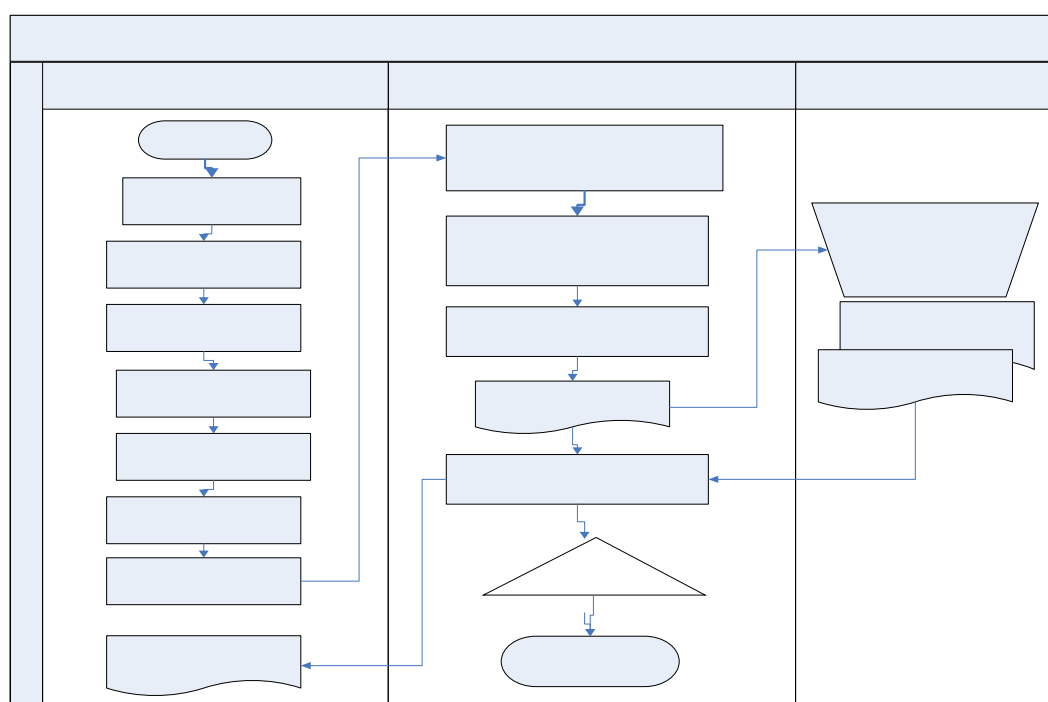
- 1) WP membuka situs DJP, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>
- 2) Memilih menu sistem e-registration
- 3) Membuat account dengan log in pada sistem e-reg. Account ini sebagai sarana bagi WP untuk dapat mengakses sistem e-reg
- 4) Login ke e-registration dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat
- 5) Memilih menu “Permohonan Pendaftaran NPWP”
- 6) Memilih jenis WP yang sesuai (orang pribadi, badan, atau bendaharawan)
- 7) Mengisi formulir permohonan pada layar sistem dengan lengkap dan benar, kemudian memilih tombol “daftar” untuk mengirim formulir tersebut.

Setelah itu, sistem e-reg ini akan memberitahukan (notifikasi) hasil permohonan pendaftaran NPWP ke alamat e-mail WP

- 8) WP mencetak formulir permohonan yang sudah diisi lengkap dan SKTS melalui aplikasi e-reg. Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) merupakan surat keterangan yang dicetak oleh WP melalui sistem e-reg yang menyatakan bahwa WP telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisi NPWP dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan yang bersifat sementara
- 9) *Log out* dari sistem e-reg dengan cara yang ditentukan sehingga data pengakses tetap dijamin kerahasiaan dan keamanannya
- 10) Formulir permohonan dan SKTS yang telah dicetak tadi beserta kelengkapan dokumen lainnya (seperti surat kuasa bila dikuasakan) kemudian dikirim (melalui pos) atau diserahkan langsung ke KPP tempat WP tersebut terdaftar, paling lambat 1 bulan sejak pendaftaran melalui e-reg. Jika WP tersebut lebih dari 1 bulan tidak menyerahkan SKTS dan berkas permohonan NPWP ke KPP yang bersangkutan, maka permohonan NPWP melalui e-reg tersebut dianggap batal
- 11) Petugas TPT memantau informasi pada sistem e-reg, kemudian mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kartu NPWP setelah menerima berkas yang dikirimkan oleh WP tersebut.
- 12) Kasie Pelayanan meneliti dan menandatangani SKT tersebut dan kartu NPWP. Setelah itu, SKT dan kartu NPWP tersebut dikirimkan atau diberikan kepada WP tersebut

13) WP menerima SKT dan kartu NPWP dari KPP dimana WP tersebut terdaftar. SKT merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak sebagai pemberitahuan bahwa WP tersebut terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan NPWP dan kewajiban perpajakan WP tersebut

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada *flowchart* berikut



Gambar 2.2 Flowchart Pendaftaran Permohonan NPWP Melalui E-Reg

Sumber : Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-37/PJ/2007

PELAYANAN PENYELESAIAN PERMOH

Wajib Pajak

Petugas

2.1.4.2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Mulai

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena

Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan

Membuka situs
www.pajak.go.id

Memilih menu
E-registration

Membuat account
dan log in

Memilih menu

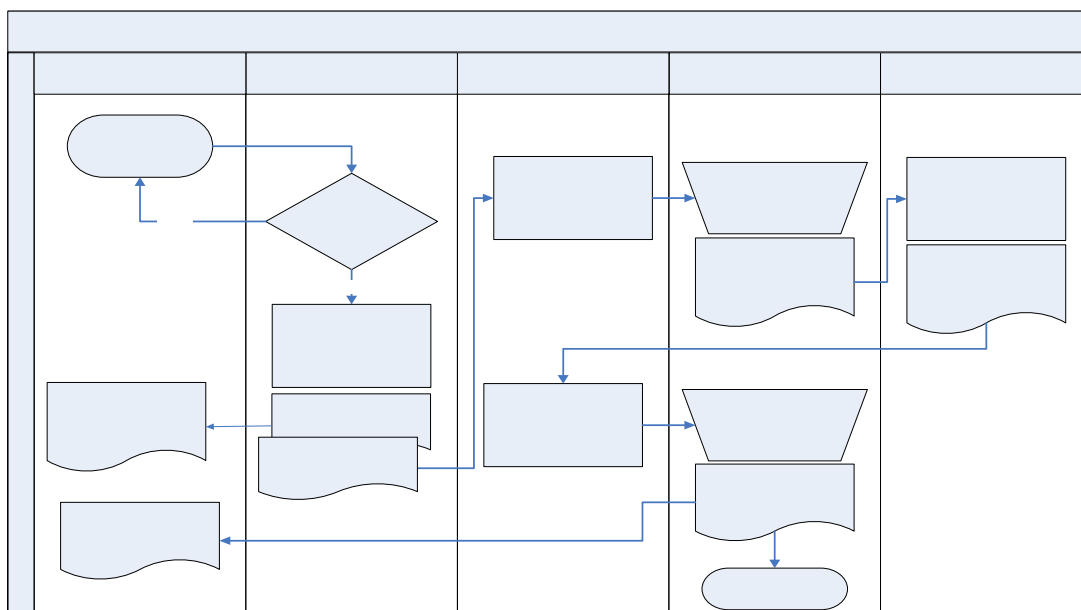
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya¹². Tidak semua WP badan yang telah terdaftar (memiliki NPWP) merupakan PKP. Bagi WP badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka dapat melakukan pemungutan PPN dan pengkreditannya melalui pajak masukan dan pajak keluaran. Untuk pengukuhan PKP ini, dapat dilakukan oleh pengusaha, baik perseorangan ataupun badan. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP ini dapat dilakukan dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Persyaratan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - 1) Fotocopy KTP / Kartu Keluarga / SIM / Paspor
 - 2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
 - 4) Isi lembar aplikasi permohonan
- b. Persyaratan NPPKP untuk WP Badan :
 - 1) Fotocopy Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT
 - 2) Fotocopy KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha (SIUP) atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

¹² Sesuai dengan pasal 1 UU KUP no.28 th.2007 angka 5

- 4) NPWP (bila telah memiliki NPWP)
- 5) PBB (bila memiliki aktiva sendiri),
- 6) Isi lembar aplikasi / permohonan

Bagi perusahaan atau badan yang ingin dikukuhkan sebagai PKP dapat mengikuti prosesnya seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3 Flowchart Proses Pengukuhan PKP

Sumber : Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak No. 12/PJ/2009

Wajib Pajak **Petugas Tempat Pelayanan Terpadu**

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan tidak dipungut biaya apapun. Kedua proses ini, yaitu proses pembuatan NPWP dan pengukuhan PKP merupakan bagian dari 8 layanan unggulan DJP¹³.

Tidak Berkas Lengkap atau Tidak ?

Ya **Mencetak BPS/ LPAD dan Mengirim Berkas Permohonan**

Tidak **Bukti Penerimaan Surat (BPS)**

Ya **Bukti Penerimaan Surat (BPS)**

Tidak **LPAD dan Berkas Permohonan**

¹³ Sesuai SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007, 8 layanan unggulan DJP ini terdiri dari : 1) Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP; 2) Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); 3) Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 4) Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); 5) Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak; 6) Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; 7) Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; dan 8) Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP atas Pengurangan PBB.

2.1.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan jumlah total keseluruhan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak ke kas negara yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Mengenai penerimaan pajak ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang telah dikutip oleh Hendri Purnomo Djati (2004), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor eksternal, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi,

Pertumbuhan ekonomi merupakan persentase kenaikan PDB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Selain dapat meningkatkan penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi bisa menggeser penduduk tertentu dari kelompok bukan pembayar pajak menjadi pembayar pajak

2. Tingkat inflasi,

Dalam jangka pendek, tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak melalui naiknya nilai nominal pendapatan masyarakat dan konsumsi. Tetapi dalam jangka panjang, tingkat inflasi dapat menurunkan penerimaan pajak melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi

3. Nilai tukar rupiah,

Untuk penerimaan pajak yang terkait dengan valuta asing, seperti PPh orang asing, PPh migas, PPN, PPnBM impor, bea masuk, dan pajak ekspor, untuk jumlah penerimaan dalam valuta asing, maka semakin lemah nilai tukar

rupiah akan meningkatkan penerimaan pajak yang bersangkutan. Sedangkan, untuk pajak dalam negeri, maka melemahnya nilai tukar rupiah akan menurunkan penerimaan pajak yang bersangkutan

4. Harga minyak internasional,

Perubahan harga minyak internasional berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dari sektor pertambangan, terutama PPh, PPN, dan PBB

5. Produksi minyak mentah internasional, dan

Faktor ini akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dari sektor migas, khususnya PPh, PPN, dan PBB

6. Suku bunga.

Perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh dari bunga deposito. Tapi, tingginya tingkat bunga ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak jenis lain

Sedangkan faktor-faktor internal antara lain seperti :

1. Besarnya dasar pengenaan pajak (*tax based*) atau objek pajak,

Undang-undang akan menentukan kondisi objek pajak, baik tarif pajak, maupun kenaikan jumlah dan nilai objek pajak. Makin banyak objek yang dapat dikenakan pajak atau makin banyak subyek pajak yang menjadi WP, maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.

2. Besarnya tarif pajak

Seperti yang telah dikemukakan di atas, tarif pajak yang ditentukan juga dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Pada tarif normal,

kenaikan tarif pajak akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, begitu juga sebaliknya

Di samping itu, faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak antara lain¹⁴ :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan

Adanya kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan, akan membuat persepsi yang sama antara WP dengan fiskus sehingga tidak akan terjadi salah penafsiran. Hal ini tentunya menimbulkan motivasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, dan akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit

2. Tingkat intelektualitas masyarakat

WP yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup, tentunya akan melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)

3. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, & moral tinggi)

Petugas pajak harus kompeten di bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak dengan tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan dari WP

¹⁴ Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*. Bandung : Kencana Prenada Media Group, hlm. 26-28

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Sistem administrasi menjadi penting, karena dengan sistem informasi yang terintegrasi dengan baik (menggunakan intranet), akan memudahkan konfirmasi antarunit (KPP) dan juga untuk memudahkan penerimaan jawaban konfirmasi ketika WP melakukan restitusi

2.2 Review Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu, pernah membahas mengenai masalah penambahan jumlah WP terdaftar ini dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda-beda, seperti yang telah dibahas oleh Hendri Purnomo Djati (2004), dalam Tesisnya yang berjudul *Pengaruh Pertambahan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak*, yang meneliti mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh badan, PPh orang pribadi, PPh pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP yang ditunjukkan dengan jumlah SPT tahunan / masa PPh badan, PPh orang pribadi, PPh pasal 21, dan PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data *cross section* tahun 2003 yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang berjumlah 175 KPP. Variabel yang diungkap yaitu variabel tambahan jumlah WP, baik WP PPh badan, PPh orang pribadi, PPh pasal 21, dan PPN (variabel X_1), variabel kepatuhan wajib pajak ditandai dengan jumlah SPT yang dilaporkan baik SPT tahunan / masa PPh badan, PPh orang pribadi, PPh pasal 21, dan PPN (variabel X_2), dan variabel penerimaan pajak keseluruhan di tahun 2003 (variabel Y). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model. Hasil penelitian ini menyimpulkan :

- a. Penambahan jumlah WP yang berpengaruh signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh badan, PPh pasal 21, dan PPN
- b. jumlah SPT dilaporkan (sebagai indikator kepatuhan WP) yang berpengaruh signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh pasal 21, dan PPN
- c. SPT PPh badan berpengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak. Karena, menurut pengamatan beliau, nilai SPT lebih bayar yang dilaporkan WP cukup besar
- d. Jenis PPh orang pribadi baik variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus tambahan jumlah WP PPh pasal 21 dan PPN dalam satu model berpengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak. Karena menurut beliau, pada awal WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan lebih bayar dan berakibat restitusi / pengembalian kelebihan membayar pajak
- e. Kebijakan penambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP sangat penting dan menjadi prioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan kawasan Pulau Jawa. Atau, kebijakan penambahan jumlah WP dan kepatuhan WP berpengaruh signifikan meningkatkan penerimaan pajak

Penelitian lainnya yang pernah membahas mengenai jumlah WP dan penerimaan pajak ini, adalah seperti yang dikemukakan oleh Mochamad Jayadi Amin (2008), dalam Skripsinya yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) pada Kantor*

Pelayanan Pajak Tebet, yang membahas mengenai efektivitas program kerja ekstensifikasi yang dilaksanakan dalam memperoleh NPWP baru dan penambahan penerimaan pajak yang dihasilkan, potensi WP OP pada wilayah kerja KPP Tebet, serta membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain: program kerja yang dilaksanakan belum efektif dalam menghasilkan NPWP baru sesuai yang ditargetkan, penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan NPWP baru belum signifikan, dan potensi WPOP masih cukup besar untuk dikembangkan, serta kendala-kendala yang terkait pelaksanaan program ini dikategorikan pada kendala eksternal dan kendala internal.

Berikutnya, mengenai hal yang sama juga pernah dibahas oleh Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008), dalam Skripsinya yang berjudul *Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di KPP Pratama Bandung-Tegallega)*, yang membahas mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X (Kegiatan Ekstensifikasi) dengan variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi) yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan Kegiatan Ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi *Pearson Product Moment* yang menghasilkan korelasi positif sebesar 88,1%. Selain itu, Kegiatan Ekstensifikasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini

dibuktikan oleh hasil penghitungan secara statistik yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,75 > 2,132$) dengan Koefisien Determinasi (Kd) sebesar 77,5% pada tingkat keyakinan/kepercayaan 95% (tingkat signifikansi (α) 0,05).

Penelitian lain, seperti yang diungkapkan oleh Entang Saefullah (2002), dalam Tesisnya yang berjudul *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Hubungannya dengan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, yang bahasannya lebih difokuskan pada analisis pengaruh variabel-variabel bebas berupa jumlah penghasilan yang diterima oleh subyek dan atau WP, tingkat pendidikan objek pajak dan atau WP, jumlah penduduk di suatu daerah, serta pandangan subyek dan atau WP terhadap administrasi perpajakan yang dilaksanakan terhadap pencapaian jumlah WP orang pribadi. Selain itu, juga menganalisis hubungan antara jumlah WP orang pribadi terhadap pencapaian PPh WP orang pribadi. Metode pengumpulan data berasal dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta studi kepustakaan, sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut secara bersama-sama sangat mempengaruhi jumlah WP orang pribadi dan penerimaan PPh orang pribadi. Sedangkan secara parsial, yang paling dominan adalah faktor-faktor jumlah penghasilan, administrasi perpajakan, dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, beliau menyarankan dalam penelitiannya, agar pihak DJP memberi perhatian khusus pada faktor-faktor tersebut dalam melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selain itu, beliau juga menyarankan agar DJP melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, terutama pemerintah

daerah dalam melakukan penggalan terhadap WP OP yang potensial yang belum tersentuh oleh pajak

Penelitian lainnya yang mungkin relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi (2009), yang berjudul *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)*¹⁵. Penelitiannya ini membahas mengenai dampak (pengaruh) program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurutnya, faktor-faktor ini diantaranya : kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, dapat diketahui bahwa program *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurutnya, kebijakan sunset ini direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak, yang dapat mempengaruhi (meningkatkan) penerimaan pajak secara signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

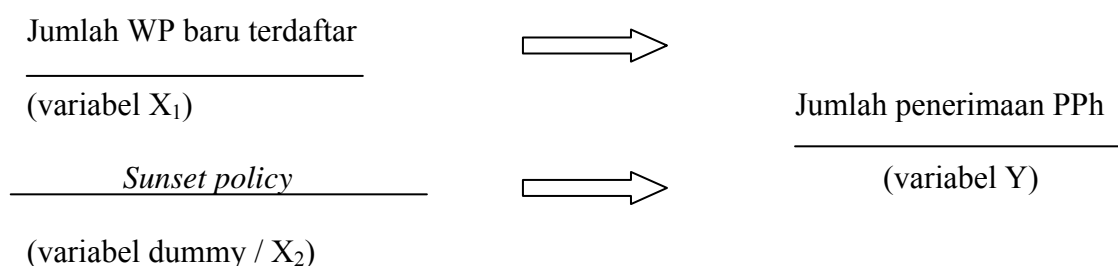
Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal, *Sunset policy* merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada WP untuk menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang. WP yang memanfaatkan *sunset policy* ini akan

¹⁵ Telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Perpajakan II, yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, pada tanggal 9 – 10 Desember 2009.

mendapatkan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang berupa penghapusan sanksi bunga. Adanya kebijakan ini, akan mendorong WP untuk melunasi semua utang pajaknya tanpa membayar bunga. Oleh karena itu, hal ini tentunya dapat meningkatkan pemasukan pajak bagi negara, khususnya pajak penghasilan. Meningkatnya penerimaan pajak ini tentunya dapat dilihat dari banyaknya jumlah WP yang mendaftarkan diri ke kantor pajak. Namun, banyaknya jumlah WP tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dapat meningkat. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *sunset policy* ini dapat dilihat dari jumlah WP terdaftar yang diimbangi dengan penambahan penerimaan pajak.

Untuk melihat pengaruh tersebut, yaitu dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan Wajib Pajak baru yang terdaftar di Kecamatan Matraman pada saat sebelum dan setelah *sunset policy*, dengan total jumlah penerimaan PPh yang diperoleh. Sehingga akan ditemukan pengaruh dari penambahan jumlah WP terdaftar terhadap penerimaan PPh, dan juga pengaruh *sunset policy* ini terhadap penerimaan PPh. Pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi linier berganda.

Dalam hal ini penambahan jumlah WP terdaftar sebagai variabel independent (variabel X_1), sedangkan penerimaan PPh merupakan variabel dependent (variabel Y). Dengan variabel dummy *sunset policy* sebagai variabel bebas ke dua (variabel X_2). Hubungan antarvariabelnya ditunjukkan seperti berikut.



2.4 Hipotesis

Sesuai dengan uraian pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini, antara lain :

a. H_{01} : Penambahan jumlah WP terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh

H_{a1} : Penambahan jumlah WP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh

b. H_{02} : *Sunset policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh

H_{a2} : *Sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek yang diteliti, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Matraman yang terletak di jalan Matraman Raya no. 43 Jakarta Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan PPh, yang berasal dari enam Kelurahan yang ada di Kecamatan Matraman yang merupakan wilayah kerja dari KPP Pratama Jakarta Matraman, yang meliputi :

- a. Kelurahan Kebon Manggis
- b. Kelurahan Palmeriam
- c. Kelurahan Pisangan Baru
- d. Kelurahan Kayu Manis
- e. Kelurahan Utan Kayu Selatan (UKS)
- f. Kelurahan Utan Kayu Utara (UKU)

Dipilihnya KPP Pratama Jakarta Matraman sebagai objek penelitian tentunya mempunyai suatu alasan tersendiri, yaitu karena Kecamatan Matraman merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman yang wilayahnya secara umum merupakan daerah hunian (pemukiman) yang sudah berumur cukup lama, di samping itu kegiatan perekonomian yang berada di wilayah ini secara sektoral lebih

terbatas karena tidak ada kegiatan-kegiatan industri, pertanian, perikanan dan pertambangan.

Sedangkan, ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman, dan juga penerimaan PPh saat sebelum maupun setelah *sunset policy* yakni pada periode tahun 2007 hingga Maret 2010. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Penulis melihat pengaruh diantara variabel-variabel tersebut (penambahan jumlah WP terdaftar dan *sunset policy*, serta tingkat penerimaan PPh), sekaligus juga untuk menilai reaksi yang dihasilkan dari *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak, khususnya PPh.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini, antara lain :

- a. Metode kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta pelaksanaannya, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu serta artikel-artikel dan berbagai sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini
- b. Metode penelitian lapangan, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan berupa data jumlah WP baru yang terdaftar, dan jumlah penerimaan PPh secara keseluruhan, yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Matraman.
- c. Metode pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis korelasi dan regresi linier berganda. Analisis korelasi digunakan untuk menentukan seberapa erat hubungan antara variabel-

variabel tersebut. Sementara itu, analisis regresi digunakan untuk membentuk suatu persamaan yang menghubungkan variabel-variabel tersebut (variabel independen dan variabel dependent, serta variabel dummy). Pengolahan datanya menggunakan *Statistical Programme for Social Science (SPSS)* versi 17.0

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya, yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Jakarta Matraman.

- a. Data jumlah WP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Matraman (variabel bebas / variabel X_1)

Data jumlah WP terdaftar ini merupakan kumpulan dari jumlah WP PPh orang pribadi (termasuk jumlah WP PPh pasal 21), dan jumlah WP PPh badan, yang baru terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman dalam periode waktu bulan Januari 2007 hingga Maret 2010. Untuk menjadi WP PPh baik orang pribadi maupun badan, maka diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data ini dinyatakan dalam jumlah Wajib Pajak.

- b. Data penerimaan pajak (variabel terikat / variabel Y)

Penerimaan pajak adalah jumlah seluruh penerimaan yang berhasil dikumpulkan, khususnya yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), yang telah masuk ke kas negara dan telah diadministrasikan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman. Data penerimaan pajak di sini hanya sebatas pada jumlah penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) termasuk bunga penagihannya yang telah masuk ke kas negara dan telah diadministrasikan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman. Semua data tersebut dinyatakan dalam rupiah

yang dilaporkan per bulan dalam periode waktu Januari 2007 hingga Maret 2010. Yang dikecualikan (tidak termasuk) dari data penerimaan pajak ini adalah data penerimaan PBB, BPHTB, PPN & PPnBM, serta bea materai.

c. *Sunset Policy* (variabel dummy / variabel X_2)

Data yang terkait dengan variabel dummy *sunset policy* ini adalah data yang memiliki kriteria : saat sebelum *sunset policy* (data tahun 2007), dan saat *sunset policy* berlangsung hingga periode setelah *sunset policy* (data tahun 2008 sampai 28 Februari 2009, dan 1 Maret 2009 hingga 31 Maret 2010). Variabel dummy tersebut dilambangkan dengan 0 untuk sebelum *sunset policy*, dan 1 untuk setelah *sunset policy*

3.4 Metode Penentuan Populasi atau Sampel

Menurut Suharyadi dan Purwanto SK¹⁶, populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran-ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah jumlah WP terdaftar beserta penerimaan PPh-nya yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Matraman dalam periode waktu bulan Januari 2007 hingga Maret 2010.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian¹⁷. Teknik penentuan sampel yang diambil dari sejumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode penarikan sampel *purposive (purposive sampling)*, yaitu suatu metode penentuan populasi atau sampel dengan

¹⁶ Suharyadi, dan Purwanto SK., 2003. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, hlm. 9

¹⁷ Ibid

menggunakan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian¹⁸. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari penambahan jumlah WP terdaftar dan *sunset policy* dengan penerimaan PPh-nya, maka sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan periode waktu, yaitu saat sebelum dan setelah *sunset policy*. Selain itu, sampel yang diambil dalam penelitian ini memiliki kriteria penerimaan PPh dan jumlah WP yang benar-benar baru ada pada periode tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria metode penarikan sampel tersebut di atas, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu jumlah keseluruhan WP baru terdaftar dan juga penerimaan PPh-nya yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Matraman dalam periode waktu Januari 2007 hingga Desember 2007 (untuk sampel yang mewakili periode sebelum *sunset policy*), dan periode waktu Januari 2008 hingga Maret 2010 (untuk sampel yang mewakili periode saat *sunset policy* berlangsung hingga setelah *sunset policy*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tiap-tiap bulan yang diurutkan berdasarkan periode waktunya (*time series*).

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data berdasarkan urutan waktu (*time series*). Data dan informasi yang dikumpulkan adalah berupa data jumlah WP baru terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman, dan juga data penerimaan PPh. Periode waktu yang digunakan adalah saat sebelum dan setelah *sunset policy*. Data tersebut diperoleh Penulis dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI) KPP Pratama Jakarta Matraman, melalui aplikasi intranet

¹⁸ Ibid., hlm.332

DJP (portal DJP), dan basis data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

3.6 Metode Analisis

Metode analisis merupakan suatu cara untuk mengolah penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang bermanfaat. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa angka-angka. Karena itu, diperlukan analisis statistik untuk melakukan proses pengolahan data penelitian tersebut menjadi suatu kesimpulan yang benar. Metode atau teknik yang digunakan yaitu analisis korelasional dan regresi linier berganda, yang sebelumnya perlu dilakukan pengujian normalitas data dan asumsi klasik terlebih dahulu agar nilai yang dihasilkan menjadi tidak bias.

3.6.1 Uji normalitas data

Uji normalitas ini merupakan pengujian yang dilakukan di awal, sebelum data tersebut diolah menjadi model-model penelitian. Tujuan dari uji normalitas ini yaitu untuk mengetahui sebaran (distribusi) data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini, normalitas data dapat dilihat dari :

- a. Nilai Skewness, yaitu melalui penilaian kemiringan kurva. Normalitas data dapat dilihat dari nilai skewness ini. Data yang terdistribusi mendekati normal, akan memiliki nilai skewness yang mendekati angka 0 (memiliki kemiringan yang cenderung seimbang)

- b. Kurva Histogram, yaitu menguji normalitas data dengan melihat bentuk gambar kurva yang dihasilkan dari data tersebut. Data yang normal akan memiliki bentuk kurva yang cenderung seimbang, baik sisi kiri maupun sisi kanan, sehingga kurva tersebut berbentuk seperti lonceng yang hampir sempurna.

3.6.2 Uji asumsi klasik

Suatu model regresi linier berganda dapat dikatakan baik jika model tersebut memenuhi kriteria normalitas data dan juga kriteria dalam uji asumsi klasik statistik, seperti :

- a. Tidak terdapat multikolinieritas, yaitu tidak diperbolehkan adanya hubungan (korelasi) antarvariabel bebasnya. Menurut Frish seperti yang dikutip oleh Suharyadi dan Purwanto SK (2004 : 528), mengatakan bahwa apabila terjadi multikolinier apalagi kolinier yang sempurna (koefisien korelasi antarvariabel bebasnya = 1), maka koefisien regresi dari variabel bebasnya tidak dapat ditentukan dan nilai standar errornya tak terhingga. Beberapa hal untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilihat dari :
 - 1) Variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata (uji F-nya nyata), tetapi setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata (uji t-nya tidak nyata)
 - 2) Nilai koefisien determinasinya (nilai R^2) sangat besar (nilai R^2 maupun R-Square di atas 0,6), tetapi tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata (uji t-nya tidak nyata)

- 3) Nilai koefisien parsial ada yang lebih besar dari nilai koefisien determinasinya. Atau, nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,7, maka model terbebas dari multikolinieritas
 - 4) Jika perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas jika nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. $VIF = 1 / Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1 / 10 = 0,1$
- b. Tidak terdapat autokorelasi, berarti bahwa tidak ada data dalam observasi ini yang saling berhubungan (memiliki korelasi). Autokorelasi ini sering terjadi pada sampel dengan data *time series*. Cara mendeteksi adanya autokorelasi, yaitu menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW), dengan rumus : $\frac{\sum(e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$. Nilai DW diperoleh dari perbandingan antara nilai DW hitung dengan nilai pada tabel Durbin-Watson menggunakan nilai d_{up} (batas atas) dan d_{Low} (batas bawah), dengan kriteria :
- 1) $(4 - d_{Low}) < DW_{hitung} < 4$, maka terdapat autokorelasi
 - 2) $0 < DW_{hitung} < d_{Low}$, maka terdapat autokorelasi
 - 3) $2 < DW_{hitung} < (4 - d_{up})$, maka tidak terdapat autokorelasi
 - 4) $d_{up} < DW_{hitung} < 2$, maka tidak terdapat autokorelasi
 - 5) $d_{Low} \leq DW_{hitung} \leq d_{up}$, maka tidak dapat disimpulkan (*no decision*)
 - 6) $(4 - d_{up}) \leq DW_{hitung} \leq (4 - d_{Low})$, maka tidak dapat disimpulkan (*no decision*)

Jika nilai d_w berkisar antara d_{up} dan $4-d_{up}$, maka nilai DW hitung terletak di daerah *No Autokorelation* (DW hitung mendekati angka 2), sehingga model regresi tersebut terbebas dari autokorelasi

- c. Tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya dalam penelitian ini nilai varians error atau residu dari persamaan regresi harus sama (homos) dan tidak boleh berbeda (heteros). Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, adalah dengan menggunakan uji Glejser dan metode grafik. Uji Glejser yaitu dengan cara mengabsolutkan nilai residual kemudian me-regressi-kan variabel independen terhadap nilai *absolute* tersebut. Setelah itu, membandingkan tingkat kesalahan ketelitian (α) yang dipakai dengan nilai *significant* variabel bebasnya. Jika nilai signifikan variabel bebasnya $>$ tingkat kesalahan ketelitian, maka penelitiannya homos, sebaliknya jika nilai signifikan variabelnya $<$ tingkat kesalahan ketelitian, maka heteros

Sedangkan metode grafik, yaitu dengan cara melihat pola gambar *Scatterplot* dari model tersebut. Analisis gambar *Scatterplot* menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, yaitu jika :

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

3.6.3 Analisis korelasional

Analisis korelasional ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang berbeda yang mana diantara variabel tersebut tidak menunjukkan hubungan sebab akibat¹⁹. Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson (*Pearson Product Moment*), yang dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X\sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2]^{1/2} [n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]^{1/2}}}$$

Di mana :

X : variabel X

Y : variabel Y

n : jumlah sampel dalam penelitian

r : koefisien korelasi

Kriteria hasil perhitungan:

Jika korelasi mendekati atau sama dengan +1, maka korelasi positif kuat

Jika korelasi mendekati atau sama dengan -1, maka korelasi negatif kuat

Jika korelasi mendekati atau sama dengan 0, maka tidak ada korelasi

Pengelompokkan sifat keeratan koefisien korelasi, antara lain berikut ini :

- a) 0,00 sampai dengan 0,2 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah
- b) 0,21 sampai dengan 0,4 berarti korelasi memiliki keeratan lemah
- c) 0,41 sampai dengan 0,7 berarti korelasi memiliki keeratan kuat
- d) 0,71 sampai dengan 0,9 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat
- e) 0,91 sampai dengan 0,99 berarti keeratan korelasi sangat kuat sekali
- f) 1 berarti korelasi sempurna

¹⁹ Agus Irianto. 2004. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.133

Pedoman yang digunakan pada analisis korelasi ini, antara lain :

- a) jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom $\text{sig.}(2\text{-tailed}) > \text{level of significant } (\alpha)$, maka tidak berkorelasi
- b) jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom $\text{sig.}(2\text{-tailed}) < \text{level of significant } (\alpha)$, maka berkorelasi

3.6.4 Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat (kausalitas) diantara variabel-variabel yang sedang diteliti. Untuk variabel dummy pada Skripsi ini terdapat dua kriteria pengelompokkan, yakni saat sebelum *sunset policy*, dan saat setelah *sunset policy* (termasuk saat *sunset policy*). Sehingga rumus persamaan regresi linier bergandanya menjadi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2D + \varepsilon$$

Di mana :

X_1 : variabel bebas 1

Y : variabel terikat

a, b_1, b_2 : koefisien regresi a, b_1 , dan b_2 ,

D : variabel dummy (variabel bebas 2)

0 = Sebelum *sunset policy*

1 = Saat *sunset policy* (termasuk setelah *sunset policy*)

ε : error

b merupakan koefisien arah dari regresi. Setiap kenaikan satu variabel bebas maka akan meningkat sebesar b. Sedangkan a merupakan nilai variabel bebas pada saat variabel tidak bebas sama dengan nol

3.6.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas menjelaskan variabel tidak bebas. Menurut Suharyadi dan Purwanto SK (2004 : 514), koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi (*regression of sum squares, RSS*) $(\hat{Y} - \check{Y})^2$ terhadap varian total (*total sum of squares, TSS*). Besarnya koefisien determinasi dihitung menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{n(a\sum Y + b_1 \cdot \sum YX_1 + b_2 \cdot \sum YX_2) - (\sum Y)^2}{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2}$$

Nilai koefisien determinasi pada output SPSS terlihat pada tabel *Model Summary* yang tertulis *R-Square*. Untuk regresi linier berganda, sebaiknya menggunakan nilai *R-Square* yang sudah disesuaikan (*Adjusted R-Square*) karena dalam hal ini, nilainya akan disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *R-Square* berkisar antara 0 hingga 1. Oleh karena itu, *R-Square* dikatakan baik jika nilainya berada di atas 0,5. Bila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mencari koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkannya

3.6.6 Pengujian hipotesis penelitian

a. Uji Simultan dengan F-test

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama. Rumus untuk menentukan nilai F-hitung, ialah :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n-3)}$$

Keterangan :

- R^2 : Koefisien determinasi
- k : jumlah variabel penelitian
- n : jumlah sampel dalam penelitian
- F : nilai uji F

Pada output SPSS, hasil uji F ini dapat dilihat pada tabel ANOVA, dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel menggunakan derajat bebas (degree of freedom / df), yaitu df1 dan df2. Hasil F-test menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika *p-value* (pada kolom *sig.*) lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau F hitung (pada kolom F) lebih besar dari F-tabel. Penghitungan F-tabel dengan cara df1 =k-1, dan df2 =n-k.

b. Uji Parsial dengan t-test

Berbeda halnya dengan uji simultan F-test di atas, pengujian parsial dengan t-test ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara individual (parsial). Untuk mengetahui

pengaruh suatu variabel secara parsial, maka digunakan uji t atau t-student.

Rumus untuk menentukan nilai t-hitung, yaitu :

$$t\text{-hitung} = \frac{b - B}{S_b}$$

Di mana :

b : koefisien b

S_b : kesalahan baku

B : B hipotesis

Pada output SPSS, hasil uji ini dapat dilihat pada tabel *Coefficients*. Nilai uji t dapat dilihat dari *p-value* (pada kolom *sig.*) pada masing-masing variabel independen, jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau t-hitung (pada kolom t) lebih besar dari t-tabel (dihitung dari *two tailed* $\alpha = 5\%$ df-k, k merupakan jumlah variabel independen).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis / Observasi

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Matraman

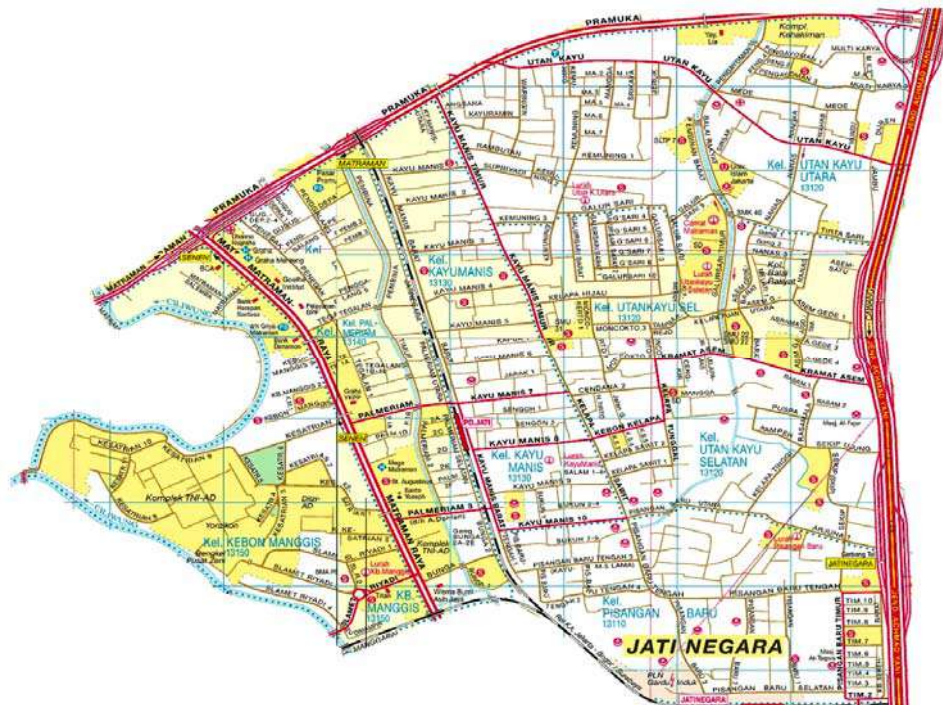
Kecamatan Matraman merupakan salah satu dari wilayah di kotamadya Jakarta Timur, selain sembilan wilayah kecamatan yang ada, yaitu :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Kecamatan Pasar Rebo | f. Kecamatan Makassar |
| b. Kecamatan Ciracas | g. Kecamatan Duren Sawit |
| c. Kecamatan Jatinegara | h. Kecamatan Pulogadung |
| d. Kecamatan Cipayung | i. Kecamatan Cakung |
| e. Kecamatan Kramatjati | |

KPP Pratama Jakarta Matraman mempunyai wilayah kerja Kecamatan Matraman yang meliputi :

1. Kelurahan Kebon Manggis
2. Kelurahan Palmeriam
3. Kelurahan Pisangan Baru
4. Kelurahan Kayu Manis
5. Kelurahan Utan Kayu Selatan (UKS)
6. Kelurahan Utan Kayu Utara (UKU)

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman seperti pada gambar 4.1 berikut ini



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Matraman

Sumber : KPP Pratama Jakarta Matraman

Batas wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman meliputi :

- Sebelah Utara : Dibatasi oleh Jalan Pramuka Raya dengan Kecamatan Johar Baru (Kodya JakPus), Jalan Matraman Dalam dengan Kecamatan Senen (Kodya Jakpus).
- Sebelah Barat : Dibatasi oleh Sungai Ciliwung dengan Kecamatan Menteng Barat (Kodya Jakpus) dengan Kecamatan Tebet (Kodya Jaksel).
- Sebelah Selatan : Dibatasi oleh rel kereta api Jakarta - Cikampek melalui Jatinegara (Kodya Jaktim).

Sebelah : Dibatasi oleh Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Kecamatan Timur Pulogadung (Jaktim).

Berdasarkan kelompok Wilayah Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi, wilayah kerja masing-masing Waskon terbagi sebagai berikut :

1. Seksi Waskon I, wilayah kerja meliputi kelurahan Utan Kayu Utara dan sebagian wilayah kelurahan Utan Kayu Selatan.
2. Seksi Waskon II, wilayah kerja meliputi kelurahan Pisangan Baru dan sebagian wilayah kelurahan Utan Kayu Selatan.
3. Seksi Waskon III, wilayah kerja meliputi kelurahan Kebon Manggis.
4. Seksi Waskon IV, wilayah kerja meliputi kelurahan Palmeriam dan wilayah kelurahan Kayu Manis.

Gambaran umum wilayah KPP Pratama Jakarta Matraman sebagai berikut :

1. Merupakan daerah pemukiman dan padat penduduk.
2. Merupakan daerah sentra perdagangan / usaha.
3. Terdapat beberapa gedung perkantoran dan perbankan seperti Bank Mandiri, BNI, BCA, Lippo Bank, BII, Bank DKI, Danamon, dan lainnya
4. Terdapat pusat pendidikan dan sekolah seperti LIA, STPI, ABA, Goethe Institute, dan beberapa SD, SMP, SMU Negeri.

Jalan utama yang merupakan jalan protokol sebagai akses untuk menuju ke pusat-pusat bisnis antara lain Jalan Pramuka Raya, Jalan Matraman Raya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Slamet Riyadi.



Gambar 4.2 Pusat perdagangan (*business centre*) Pasar Burung Pramuka Jalan Pramuka Raya – Kec. Matraman

Sumber : Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2008

Pada umumnya wilayah Kecamatan Matraman merupakan daerah hunian (pemukiman) yang sudah berumur cukup lama, di samping itu kegiatan perekonomian yang berada di wilayah ini secara sektoral lebih terbatas karena tidak adanya areal yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan industri, pertanian, perikanan dan pertambangan.

Jalan Matraman Raya merupakan sentra (pusat) perekonomian yang potensial di KPP Pratama Jakarta Matraman, sebagian besar diperuntukkan bagi Kantor Militer, Kantor Pemerintahan, Bank, Gereja dan sekolah berikut fasilitas pendidikan dan sarananya. Kantor, Bank, dan Hotel yang ada, umumnya merupakan cabang atau perwakilan dari kantor pusatnya yang berada di luar wilayah KPP Pratama Jakarta Matraman.

4.1.2 Keadaan Demografi dan Jumlah Wajib Pajak

Demografi (kependudukan) merupakan faktor terpenting dalam tercapainya pembangunan. Karena, tanpa didukung oleh peran serta dari masyarakat setempat, maka pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Keadaan demografi di wilayah Kecamatan Matraman jika dibandingkan dengan luas wilayahnya pada tiap-tiap kelurahan disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk
Keadaan Per 1 Januari 2008

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	JUMLAH			
			PENDUDUK	KK	RW	RT
1	2	3	4	5	6	7
1	Kebon Manggis	78,21	21.619	7.791	4	64
2	Palmeriam	65,39	18.366	5.750	10	129
3	Pisangan Baru	67,51	42.155	13.505	15	169
4	Kayu Manis	57,06	34.035	10.144	9	133
5	Utan Kayu Selatan	122,22	38.667	13.398	14	173
6	Utan Kayu Utara	107,40	39.454	10.322	10	136
Jumlah		487,79	194.296	60.910	62	804
Jumlah Tahun Sebelumnya			193.750	58.241		

Sumber : *Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2008*

Berdasarkan tabel di atas dapat disebutkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Matraman berjumlah 194296 jiwa yang tersebar pada lima kelurahan yang ada di Kecamatan Matraman, dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Pisangan Baru yaitu sebanyak 42155 jiwa (23,04 % dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Matraman). Sedangkan luas wilayah Kecamatan Matraman secara keseluruhan mencapai 487,79 hektar, dengan wilayah yang paling luas adalah Kelurahan Utan Kayu Selatan (UKS) yaitu sebesar 122,22 hektar (23,09 % dari luas wilayah Kecamatan Matraman).

Sedangkan jika dilihat dari jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) per jenis usaha yang ada di KPP Pratama Jakarta Matraman dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini

Tabel 4.2
Jumlah PKP per Jenis Usaha
KPP Pratama Jakarta Matraman Per 01 Januari 2008

JENIS USAHA	WAJIB PAJAK	
	BADAN	ORANG PRIBADI
Industri	282	24
Perdagangan	3.846	105
Jasa	1.835	76
Jumlah	5.963	205

Sumber : Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2008

Dari tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa Pengusaha Kena Pajak per jenis usaha yang paling menonjol di wilayah KPP Pratama Jakarta Matraman adalah jenis usaha perdagangan, walaupun di wilayah KPP Pratama Jakarta Matraman tidak terdapat Mal atau Plaza sebagai pusat perdagangan.

Untuk perkembangan jumlah WP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara umum, jumlah WP orang pribadi lebih mendominasi daripada jumlah WP badan. Berikut ini tabel perkembangan WP terdaftar

Tabel 4.3 Perkembangan WP Terdaftar Menurut Jumlah SPT

Wajib Pajak	KPP Pratama Jakarta Matraman			Growth (%)	
	2007	2008	2009	2007-2008	2008-2009
1	2	3	4	$5 = (3-2) / 2$	$6 = (4-3) / 3$
WP BADAN					

WP terdaftar					
- Domisili / pusat	5137	5520	6692		
- Cabang / lokasi	63	65	71		
Total	5200	5585	6763	7,4 %	21,09 %
WP ORANG PRIBADI					
WP terdaftar	9479	18723	41777	97,52 %	123,13 %

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Matraman

4.1.3 Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Matraman

Dari data yang ada, terlihat bahwa target penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2004 sebesar Rp 110,477 milyar dan realisasinya sebesar Rp 111,855 milyar atau 101,25%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005, rencana penerimaan pajak KPP Jakarta Matraman naik menjadi Rp 148,507 milyar yang dapat direalisasikan sebesar Rp153,056 milyar atau 103,06 %. Sedangkan untuk tahun 2006 rencana penerimaan pajak juga meningkat menjadi Rp 193,270 milyar dan realisasinya sebesar Rp 196,596 milyar atau 101,72 %. Untuk tahun 2007 rencana penerimaan pajak Rp 289,701 milyar dan realisasinya sebesar Rp 196,685 milyar atau 67,89 %. Sedangkan untuk tahun 2008 rencana penerimaan pajak Rp165,516 milyar, realisasinya mencapai Rp 206,693 milyar atau sebesar 124,88% dari rencana penerimaan.

Tabel 4.4
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2004-2008

(dlm milyar rupiah)

No	URAIAN	2004		2005		2006		2007		2008	
		Ren cana	Real sasi	Ren cana	Real sasi	Ren cana	Real sasi	Ren cana	Real sasi	Ren cana	Real sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PPh	38.1 52	38.84 3	58.4 95	60.2 67	92.0 12	93.45 8	168. 559	71.19 7	61,7 59	89.82 8

2	PPN & PPnBM	72.3 25	73.01 2	90.0 12	92.7 89	101. 258	103.1 38	121. 142	125.4 88	82,0 80	99,73 0
3	PBB & BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6 77	17,13 5
4	Pajak Lainnya	0,15 7	0,002 39	0,05 28	0,14 45	0,08 39	0,158 2	0,04 812	0,007 07	0,00 593	0,001 847
JUMLAH		110. 477	111.8 55	148. 507	153. 056	193. 270	196.5 96	289. 701	196.6 85	165. 516	206.6 93

*) PBB dan BPHTB untuk tahun 2007 ke bawah dikelola KP.PBB Jakarta Timur Satu

Sumber: KPP Pratama Jakarta Matraman, Data Diolah Penulis

Sesuai dengan data tersebut, penerimaan PPh hanya menyumbang sekitar 34,73 % (tahun 2004), 39,38 % (tahun 2005), 47,54 % (tahun 2006), 36,2 % (tahun 2007), dan 43,46 % (tahun 2008), dari total realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan setiap tahunnya. Sedangkan, kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak secara keseluruhan untuk setiap tahunnya berasal dari penerimaan PPN & PPnBM, yaitu sebesar 65,27 % di tahun 2004, sebesar 60,62 % di tahun 2005, sebesar 52,46% di tahun 2006, sebesar 63,8 % di tahun 2007, dan sebesar 48,25 % untuk tahun 2008.

Target penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Matraman ini setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Pencapaian realisasi ini membutuhkan kerja keras dari segenap aparat pajak khususnya pegawai KPP Pratama Jakarta Matraman agar rencana penerimaan pajak tersebut dapat direalisasikan melebihi target yang telah ditetapkan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Uji Normalitas Data

Seperti yang telah dikemukakan pada bab 3, sebelum data tersebut diolah menjadi model-model penelitian, maka perlu untuk melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tujuan dari uji normalitas ini yaitu untuk mengetahui sebaran (distribusi) data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang memiliki distribusi normal. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.5 Data Variabel Penelitian

Obs.	Bulan	Tahun	Penerimaan PPh (Rp)	Jumlah WP baru (WP)	Dummy <i>Sunset Policy</i>
1	Januari	2007	5,493,088,306	70	0
2	Februari	2007	5,698,843,960	78	0
3	Maret	2007	8,468,534,849	95	0
4	April	2007	4,228,697,002	82	0
5	Mei	2007	4,225,397,182	249	0
6	Juni	2007	4,015,282,972	1318	0
7	Juli	2007	5,158,374,039	811	0
8	Agustus	2007	4,968,496,416	869	0
9	September	2007	4,464,403,416	3427	0
10	Oktober	2007	4,450,324,350	1062	0
11	Nopember	2007	6,076,285,026	1414	0
12	Desember	2007	13,949,279,256	450	0
13	Januari	2008	6,114,970,269	917	1
14	Februari	2008	7,483,951,172	827	1
15	Maret	2008	11,972,312,489	622	1
16	April	2008	5,843,908,272	367	1
17	Mei	2008	8,295,906,628	294	1
18	Juni	2008	6,303,970,808	233	1
19	Juli	2008	5,754,375,582	253	1
20	Agustus	2008	7,754,272,488	425	1
21	September	2008	6,699,026,861	1676	1
22	Oktober	2008	6,453,180,076	2791	1
23	Nopember	2008	6,739,062,219	3617	1
24	Desember	2008	10,413,888,282	6433	1
25	Januari	2009	7,062,006,640	3334	1
26	Februari	2009	7,531,670,705	2843	1
27	Maret	2009	12,443,141,973	1681	1
28	April	2009	10,529,210,726	855	1
29	Mei	2009	6,462,133,196	525	1

30	Juni	2009	6,598,878,200	526	1
31	Juli	2009	7,364,489,580	635	1
32	Agustus	2009	6,626,616,041	707	1
33	September	2009	7,152,397,544	357	1
34	Oktober	2009	6,210,907,095	513	1
35	Nopember	2009	6,715,043,813	855	1
36	Desember	2009	12,019,804,502	1747	1
37	Januari	2010	7,862,301,816	2452	1
38	Februari	2010	6,648,597,848	904	1
39	Maret	2010	9,359,668,089	936	1

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Matraman, Data Diolah Penulis

Keterangan :

Penerimaan Pajak Penghasilan (Rupiah) = Variabel Y

Jumlah WP baru terdaftar (WP) = Variabel X₁

Dummy *sunset policy* = Variabel X₂

0 : Sebelum *Sunset Policy*

1 : Sesudah *Sunset Policy*

Dari data tersebut, setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan program SPSS, maka didapatkan hasilnya bahwa sebaran (distribusi) datanya tidak normal. Hal ini terlihat dari nilai Skewness yang tidak mendekati angka 0, seperti yang terlihat pada tabel output SPSS berikut ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data pada SPSS

Descriptive Statistics										
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Jumlah WP baru	39	70	6433	1211.54	1304.384	1701416.729	2.175	.378	5.795	.741
Penerimaan PPh	39	3754375582	13949279256	5.84E9	2.227E9	4.959E18	1.929	.378	3.815	.741

Dummy	39	0	1	.69	.468	.219	-0.867	.378	-1.319	.741
Valid N (listwise)	39									

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Sesuai dengan perhitungan nilai Skewness pada tabel di atas, maka yang memiliki distribusi data tidak normal adalah variabel jumlah WP baru (dengan nilai Skewness sebesar 2,175) dan variabel penerimaan PPh (dengan nilai Skewness sebesar 1,929). Sedangkan variabel dummy (dengan nilai Skewness sebesar -0,867) telah memiliki distribusi normal. Variabel yang berdistribusi normal adalah variabel yang memiliki nilai Skewness mendekati angka 0.

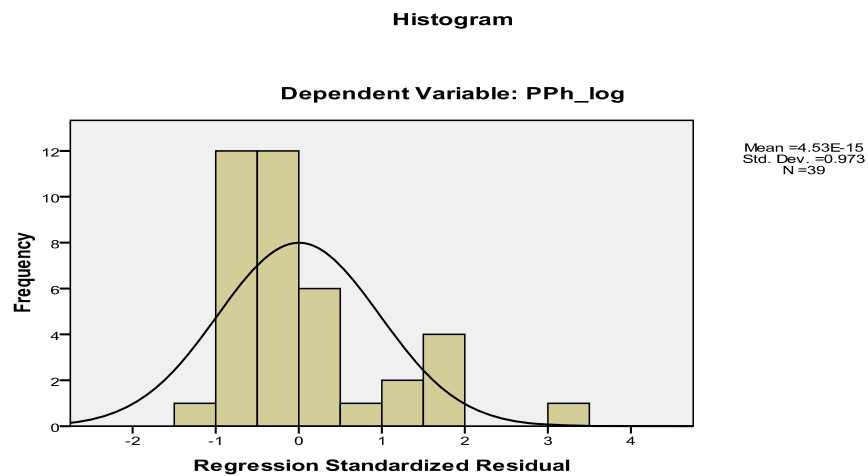
Karena sebaran datanya tidak normal, maka perlu dilakukan transformasi data pada kedua variabel tersebut. Transformasi data yang akan digunakan pada Skripsi ini adalah transformasi ke dalam bentuk logaritma. Setelah dilakukan transformasi data, kemudian dilakukan uji normalitas kembali atas data yang telah ditransformasi tersebut. Berikut ini hasil uji normalitas data yang telah dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas pada SPSS Setelah Transformasi Data

Descriptive Statistics										
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
							Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
jml_WP_baru_log	39	1.85	3.81	2.8585	.47882	.229	-.341	.378	-.103	.741
PPh_log	39	9.60	10.14	9.8378	.13340	.018	.435	.378	-.033	.741
Dummy	39	0	1	.69	.468	.219	-.867	.378	-1.319	.741
Valid N (listwise)	39									

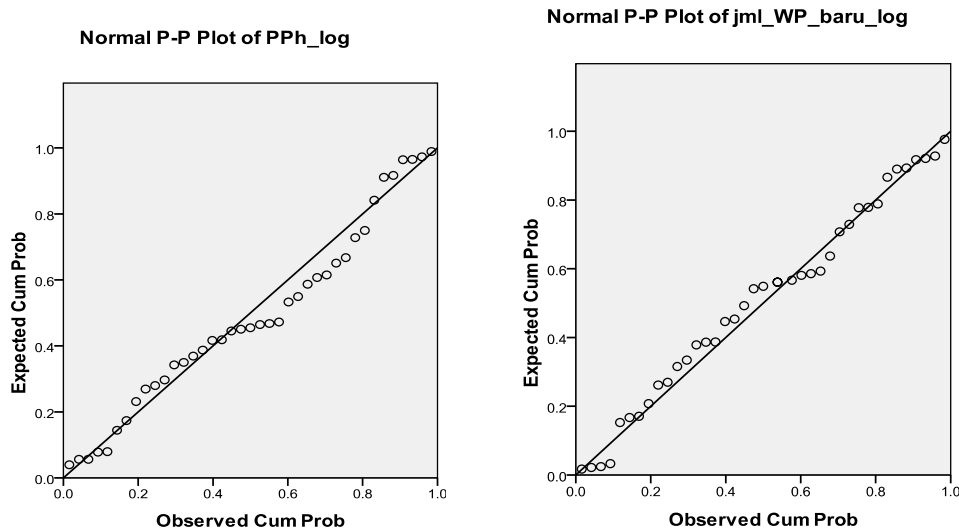
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Tabel di atas memberikan informasi bahwa setelah dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma, maka semua data pada variabel-variabel tersebut telah memiliki distribusi normal. Data tersebut telah terdistribusi normal yang dapat dilihat dari nilai Skewness-nya dari setiap variabel yang mendekati nilai 0. Karena semua data pada variabel tersebut telah memenuhi asumsi normalitas, maka data tersebut telah layak untuk digunakan dalam penelitian. Distribusi normal dari variabel-variabel ini juga tergambar pada kurva-kurva berikut ini



Gambar 4.3 Kurva Histogram Distribusi Normal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS



Gambar 4.4 Kurva Normal P-Plot Variabel Y dan Variabel X_1

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Selain memenuhi asumsi normalitas data, suatu model regresi linier berganda dapat dikatakan baik jika model tersebut memenuhi kriteria uji asumsi klasik statistik, seperti tidak terdapat multikolinieritas, tidak terdapat autokorelasi, dan juga tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut ini diuraikan hasilnya, yaitu :

4.2.2.1 Multikolinieritas

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 3 di atas, bahwa suatu model persamaan regresi dikatakan baik jika tidak terdapat multikolinieritas, yaitu tidak diperbolehkan adanya hubungan (korelasi) antarvariabel bebasnya. Singkatnya, hasil uji multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada hasil output SPSS *tabel Coefficient*, yang masing-masing variabel bebasnya

memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model persamaan regresi tersebut terbebas dari multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas data yang digunakan dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.704	.118		81.963	.000		
	jml_WP_baru_log	.015	.043	.054	.344	.733	.880	1.136
	Dummy	.132	.044	.462	2.973	.005	.880	1.136

a. Dependent Variable: PPh_log

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Sesuai dengan *tabel Coefficient* di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai VIF dari setiap variabel bebasnya kurang dari 10, yaitu sebesar 1,136 untuk variabel jumlah WP baru dan variabel dummy. Nilai *Tolerance*-nya lebih besar dari 0,1, yaitu 0,880 untuk variabel X_1 dan variabel D. Oleh karena itu, variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini telah terbebas dari asumsi klasik multikolinieritas.

4.2.2.2 Autokorelasi

Pengujian autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan (korelasi) antarvariabel-variabel dalam observasi tersebut. Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson, yaitu dengan cara

membandingkan nilai DW hitung dengan nilai DW tabel (yaitu nilai d_u dan d_L yang merupakan nilai tabel Durbin-Watson). Pada output SPSS, nilai DW hitung akan terlihat pada tabel *summary* seperti berikut ini

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.483 ^a	.234	.191	.11998	1.996

a. Predictors: (Constant), Dummy , jml_WP_baru_log

b. Dependent Variable: PPh_log

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Pada *output* tersebut, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,996. Langkah selanjutnya, yaitu membandingkan uji tersebut menggunakan table Durbin-Watson, dengan menggunakan nilai d_L (batas bawah) dan d_u (batas atas). Jumlah variable bebas (k) = 2, dan jumlah sample (n) = 39, maka nilai d_L dan d_u -nya berdasarkan table Durbin-Watson (tabel terlampir) adalah sebesar $d_u = 1,38$ dan $d_L = 1,60$

Dengan :

Nilai $4 - d_u = 4 - 1,38 = 2,62$ dan

Nilai $4 - d_L = 4 - 1,60 = 2,4$

Maka dalam hal ini perhitungannya yaitu :

$$2 < DW_{hitung} < (4 - d_{up}) \quad \longrightarrow \quad \text{tidak terdapat autokorelasi}$$

$$2 < 1,996 < 2,62$$

Perhitungan ini memenuhi salah satu kriteria Durbin-Watson, yaitu tidak terdapat autokorelasi, sehingga data yang tersedia layak untuk digunakan dalam penelitian.

4.2.2.3 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini untuk menguji varians errors dari persamaan regresi tersebut harus sama (homos) dan tidak boleh heteros. Uji heteros ini menggunakan uji Glejser dan gambar *scatterplot*.

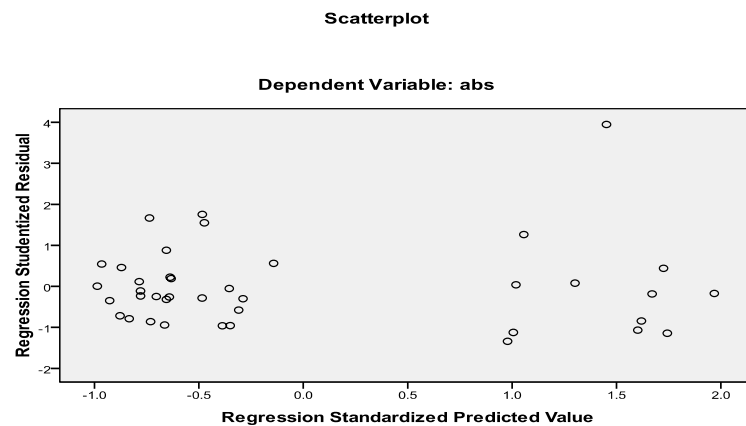
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.085	.076		1.125	.268		
	jml_WP_baru_log	.009	.028	.059	.340	.736	.880	1.136
	Dummy	-.037	.028	-.224	-1.288	.206	.880	1.136

a. Dependent Variable: abs

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Sesuai dengan hasil output SPSS pada tabel 4.10 di atas, maka dapat diketahui nilai Signifikan dari setiap variabel bebasnya, yaitu variabel WP baru sebesar 73,6 % dan variabel dummy sebesar 20,6 %. Sedangkan α yang digunakan adalah 5 %. Sesuai hasil tersebut, maka data dalam penelitian ini bersifat homos, karena nilai signifikannya > 5 %. Data ini layak dipakai dalam penelitian. Begitu juga halnya pada kurva *scatterplot* yang titik-titiknya terlihat sedikit menyebar, dan tidak berpola, seperti pada gambar 4.5 berikut



Gambar 4.5 Kurva Scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

4.2.3 Analisis Korelasional

Untuk mengetahui hubungan antarvariabel berbeda yang diantara variabel tersebut tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, maka dapat digunakan analisis korelasional. Metode korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson (*Pearson Product Moment*). Dengan asumsi bahwa data terdistribusi normal, maka hasil dari uji korelasi terlihat seperti pada tabel berikut

Tabel 4.11 Hasil Uji Korelasi

		Correlations		
		jml_WP_baru_log	PPh_log	Dummy
jml_WP_baru_log	Pearson Correlation	1	.214	.346*
	Sig. (2-tailed)		.192	.031
	N	39	39	39
PPh_log	Pearson Correlation	.214	1	.481**
	Sig. (2-tailed)	.192		.002
	N	39	39	39

Dummy	Pearson Correlation	.346*	.481**	1
	Sig. (2-tailed)	.031	.002	
	N	39	39	39

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Dari hasil output SPSS tersebut, analisis korelasinya antara lain :

- a. Koefisien korelasi jumlah WP baru dengan penerimaan PPh sebesar 0,214 berarti jumlah WP baru dengan penerimaan PPh memiliki keeratan korelasi lemah. Nilai *p-value* pada kolom *sig.(2-tailed)* $0,192 > 0,05$ *level of significant* (α). Ini artinya, jumlah WP baru tidak berkorelasi dengan penerimaan PPh
- b. Koefisien korelasi jumlah WP baru dengan dummy sebesar 0,346 berarti jumlah WP baru dengan dummy memiliki keeratan korelasi lemah. Nilai *p-value* pada kolom *sig.(2-tailed)* $0,031 < 0,05$ *level of significant* (α). Ini artinya, jumlah WP baru berkorelasi dengan dummy *sunset policy*
- c. Koefisien korelasi penerimaan PPh dengan dummy sebesar 0,481 berarti penerimaan PPh dengan dummy memiliki keeratan korelasi kuat. Nilai *p-value* pada kolom *sig.(2-tailed)* $0,002 < 0,05$ *level of significant* (α). Artinya, penerimaan PPh berkorelasi dengan dummy *sunset policy*

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui hubungan sebab akibat (kausalitas) diantara variabel-variabel yang sedang diteliti., maka digunakan analisis regresi linier. Skripsi ini

menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji dan menjawab hipotesis yang telah diajukan pada bab 2 di atas. Persamaan regressinya adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2D + \varepsilon$$

Dengan menggunakan persamaan regresi berganda ini, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.12 Hasil Uji Regressi

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.704	.118		81.963	.000		
	jml_WP_baru_log	.015	.043	.054	.344	.733	.880	1.136
	Dummy	.132	.044	.462	2.973	.005	.880	1.136

a. Dependent Variable: PPh_log

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Sesuai dengan hasil yang tertera pada table tersebut, maka persamaan regressi-nya :

$$Y = 9,704 + 0,015 X_1 + 0,132 D + \varepsilon$$

Dari persamaan ini dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah WP baru sebanyak satu orang akan meningkatkan penerimaan PPh sebanyak Rp 0,015. Dummy *sunset policy* yakni untuk periode saat *sunset policy* dengan sebelum *sunset policy*, apabila pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan PPh dari sebelum *sunset policy* hingga setelah *sunset policy*, maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar Rp0,132. Sedangkan, jika semua variabel independen dianggap konstan, maka penerimaan PPh (Y) ialah sebesar Rp 9,704.

4.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas dapat menjelaskan variabel tidak bebas. Koefisien determinasi pada output SPSS terlihat pada tabel *Model Summary* yang tertulis *R-Square*. Hasil SPSS dari koefisien determinasi ini terlihat berikut ini

Tabel 4.13
Output SPSS Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.483 ^a	.234	.191	.11998	1.996

a. Predictors: (Constant), Dummy , jml_WP_baru_log

b. Dependent Variable: PPh_log

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Sesuai dengan output SPSS tersebut, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) sebesar 0,191. Hal ini berarti bahwa 19,1 % variabel penerimaan PPh dijelaskan oleh variabel bebas jumlah WP baru dan dummy *sunset policy*. Sedangkan sisanya sebesar 80,9 % (100 % - 19,1 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Rendahnya nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa mayoritas kontribusi penerimaan PPh lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, selain faktor penambahan jumlah WP baru dan pelaksanaan *sunset policy*.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

4.2.6.1 Uji Simultan dengan F-test

Uji simultan F-test bertujuan untuk menguji kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama. Hasil F-test pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA seperti berikut ini

Tabel 4.14 Output SPSS Uji Simultan F-test

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.158	2	.079	5.489	.008^a
	Residual	.518	36	.014		
	Total	.676	38			

a. Predictors: (Constant), Dummy , jml_WP_baru_log

b. Dependent Variable: PPh_log

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan pada output SPSS tersebut, maka nilai *p-value* pada kolom *significant* sebesar $0,008 < 0,05$, yang berarti signifikan. Jumlah variable (k) = 3, dan jumlah sample (n) = 39, maka nilai df_1 dan df_2 -nya adalah sebesar $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$, dan $df_2 = n-k = 39-3 = 36$, dengan demikian nilai F-tabelnya sebesar 3,266 (tabel terlampir). Jika dibandingkan, maka nilai F-hitung $5,489 > F$ -tabel 3,266, yang artinya signifikan. Ini berarti penambahan jumlah WP terdaftar dan *sunset policy* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh.

4.2.6.2 Uji Parsial dengan t-test

Uji parsial dengan t-test ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara individual (parsial).

Nilai dari hasil uji t pada output SPSS dapat dilihat pada tabel *Coefficients* seperti berikut ini

Tabel 4.15 Output SPSS Uji Parsial t-test

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.704	.118		81.963	.000		
	jml_WP_baru_log	.015	.043	.054	.344	.733	.880	1.136
	Dummy	.132	.044	.462	2.973	.005	.880	1.136

a. Dependent Variable: PPh_log

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Untuk mengetahui hasil uji parsial ini, dengan cara membandingkan nilai *p-value* pada kolom *significant* dengan α , kemudian membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Untuk mencari t-tabel dengan menghitung nilai derajat bebas (*degree of freedom / df*) dari uji dua arah. Jumlah seluruh variable (k) = 3, dan jumlah sample (n) = 39, maka nilai df-nya adalah sebesar $df = n - k = 39 - 3 = 36$. Nilai t-tabel dengan *two tailed* $\alpha = 5\%$, $df = 36$ adalah 2,0294 (tabel terlampir).

Sesuai dengan output SPSS pada tabel di atas, maka hasil uji parsial t-test terhadap variabel bebasnya, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk variabel jumlah WP baru memiliki nilai *p-value* pada kolom *significant* sebesar $0,733 > 0,05$, yang berarti tidak signifikan. Jika dibandingkan, maka nilai t-hitung $0,344 < t\text{-tabel } 2,0294$, yang artinya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial untuk hipotesis yang diajukan pada

penelitian ini, H_{01} diterima, dan H_{a1} ditolak. Ini berarti variabel jumlah WP baru secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh.

- b. Untuk variabel dummy memiliki nilai *p-value* pada kolom *significant* sebesar $0,005 < 0,05$, yang berarti signifikan. Jika dibandingkan, maka nilai t-hitung $2,973 > t\text{-tabel } 2,0294$, yang artinya signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial untuk hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, H_{02} ditolak, dan H_{a2} diterima. Ini berarti untuk variabel *sunset policy* dari periode sebelum *sunset policy* hingga setelah *sunset policy*, secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPh

4.2.7 Pembahasan / Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penambahan jumlah WP terdaftar dan *sunset policy* terhadap penerimaan pajak, khususnya PPh. Untuk melihat pengaruh tersebut, yaitu dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan Wajib Pajak baru yang terdaftar di Kecamatan Matraman saat sebelum dan setelah *sunset policy*, dengan total jumlah penerimaan PPh yang diperoleh. Sehingga ditemukan pengaruh dari penambahan jumlah WP terdaftar terhadap penerimaan PPh, dan juga pengaruh *sunset policy* ini terhadap penerimaan PPh. Pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa persamaan regresi telah terbebas dari asumsi klasik, seperti multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan dari persamaan regresi ini menjadi layak dan dapat diandalkan. Sesuai hasil analisis, terlihat bahwa variabel jumlah WP baru

(variabel X_1) tidak signifikan terhadap variabel penerimaan PPh (variabel Y), dengan koefisien korelasi sebesar 21,4 % (memiliki korelasi lemah atau tidak berkorelasi). Sehingga, menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penambahan jumlah WP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh (H_{a1} ditolak). Hal ini disebabkan karena mayoritas jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Matraman merupakan WP OP yang memiliki kegiatan usaha perdagangan dan jumlah setoran pajak yang kecil atau nihil. Hal ini sesuai dengan gambaran umum wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman yang merupakan daerah sentra perdagangan / usaha. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendri Purnomo Djati (2004) dan Mochamad Jayadi Amin (2008), yang menyatakan bahwa jumlah WP OP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.

Sedangkan untuk variabel dummy *sunset policy* (variabel X_2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh (variabel Y), dengan koefisien korelasi sebesar 48,1 % (berkorelasi kuat). Sehingga, untuk hipotesis ke dua yang menyatakan bahwa *sunset policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh ditolak (H_{o2} ditolak). Hal ini tentunya mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi (2009). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *sunset policy* mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya bagi WP yang terdaftar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari jumlah WP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman dan pelaksanaan *sunset policy* terhadap penerimaan PPh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, berikut ini :

- a. Umumnya, wilayah Kecamatan Matraman merupakan daerah hunian (pemukiman), dengan jenis usaha yang paling menonjol adalah jenis usaha perdagangan, walaupun tidak terdapat Mal / Plaza sebagai pusat perdagangan.
- b. Penambahan jumlah WP terdaftar dan *sunset policy* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh (nilai F-hitung 5,489 > F-tabel 3,266), dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,191 atau sebanyak 19,1 % variabel penerimaan PPh dijelaskan oleh variabel bebas jumlah WP baru dan dummy *sunset policy*. Sedangkan sisanya sebesar 80,9 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain
- c. Sesuai hasil uji hipotesis, ternyata secara parsial, penambahan jumlah WP tidak memberikan hasil yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan PPh (tidak berpengaruh signifikan) dengan t-hitung 0,344 < t-tabel 2,0294 dan memiliki koefisien korelasi sebesar 0,214 (korelasi lemah) dengan *p-value* pada kolom *sig.(2-tailed)* 0,192 > 0,05 *level of significant* (α). Hal ini disebabkan mayoritas jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Matraman merupakan WP

OP yang memiliki usaha perdagangan dan jumlah setoran pajak yang kecil atau nihil. Hal ini sesuai dengan gambaran umum wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman yang merupakan daerah sentra perdagangan / usaha.

- d. Dummy *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh dengan nilai t-hitung $2,973 > t\text{-tabel } 2,0294$ dan memiliki koefisien korelasi sebesar $0,481$ (korelasi kuat) dengan nilai *p-value* pada kolom *sig.(2-tailed)* $0,002 < 0,05 \text{ level of significant } (\alpha)$. Sedangkan, jumlah WP baru dan dummy *sunset policy* berkorelasi lemah dengan nilai koefisien korelasinya sebesar $0,346$. Nilai *p-value* pada kolom *sig.(2-tailed)* $0,031 < 0,05 \text{ level of significant } (\alpha)$.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka Penulis merekomendasikan hal-hal berikut ini :

- a. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh signifikan meningkatkan penerimaan PPh. Hal ini mengindikasikan bahwa *sunset policy* mendapat respon yang baik dari WP. Oleh karena itu, untuk ke depannya pemerintah hendaknya dapat lebih meningkatkan penerimaan PPh-nya dengan melakukan berbagai upaya, misalnya dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan jemput bola agar penyampaian SPT dapat lebih mudah, melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT / RW, dsb
- b. Penambahan jumlah WP tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, yang disebabkan mayoritas WP yang terdaftar adalah WP OP. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah melakukan peningkatan dalam strategi pelaksanaan ekstensifikasi WP PPh orang pribadi dengan cara lebih

meningkatkan kegiatan pendataan dan penyisiran pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang diduga memiliki penghasilan cukup tinggi tetapi belum tersentuh untuk menjadi WP.

- c. Selain itu, perlu juga untuk lebih meningkatkan kegiatan intensifikasi WP dengan cara lebih meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pemanfaatan jumlah WP yang telah terdaftar agar dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPh. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh tambahan jumlah WP baru yang benar-benar potensial dan tidak hanya menjadi beban administrasi, yang disebabkan penambahan jumlah WP yang besar namun tidak / jarang melakukan kewajiban perpajakan
- d. Perlu untuk melakukan pembenahan administrasi perpajakan dan *database* penambahan jumlah WP pada rekap laporan bulanan, misalnya dengan cara melakukan pengelompokan WP menurut jenisnya yaitu WP badan, WP orang pribadi (pekerja bebas), WP orang pribadi karyawan, dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan untuk mempermudah dalam mengetahui penambahan jumlah WP yang lebih berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PPh untuk setiap bulannya
- e. Untuk penelitian selanjutnya, agar kesimpulan yang dihasilkan dapat menggeneralisasi, sebaiknya objek yang dipilih tidak hanya untuk satu kecamatan saja, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi misalnya kanwil atau tingkat pusat. Selain itu, perlu juga penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak, selain penambahan jumlah WP dan *sunset policy*

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Amin, Mochammad Jayadi. 2008. "Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet" (Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia)
- Aritosa Hidayat, Abu Gandjar. 2008. " Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di KPP Pratama Bandung-Tegallega)". (Skripsi diajukan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama)
- Departemen Keuangan. Tth. *Modul Pajak Penghasilan Diklat Teknis Substansif Dasar Pajak II*. Penerbit Pusat Pendidikan dan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Detik Finance. 2009. "Sunset Policy dalam Konteks Perpajakan", (Online), (<http://www.detikfinance.com/read/2009/01/09/153420/1065809/9/sunset-policy-dalam-konteks-perpajakan-indonesia>, diakses 20 Maret 2010)
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Bandung : Kencana Prenada Media Group
- Djati, Hendri Purnomo. 2004. "Pengaruh Pertambahan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak". (Tesis diajukan untuk mendapat gelar magister akuntansi, Jakarta : Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
- Djuanda, Gustian, dan Irwansyah Lubis. 2002. *Pelaporan Pajak Penghasilan Edisi Revisi*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Padang : Kencana Prenada Media Group

- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Bulaksumur : Penerbit Andi Yogyakarta
- Menteri Keuangan. 2009. “Perkembangan Krisis Global dan Dampaknya bagi Perekonomian & APBN 2009”. Slide ini Disampaikan Menteri Keuangan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI 12 Februari 2009
- Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2008
- Nanggroe Administrator. 2009. ”Kesadaran Membayar pajak Masih Kurang”, (Online), (<http://serambinews.com/news/kesadaran-membayar-pajak-masih-kurang>, diakses 30 Nop 2009)
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan edisi 3*. Jakarta : Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Jakarta : Mediakom
- Rantung, Tatiana Vanessa, dan Priyo Hadi. 2009. “Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga” (Artikel Penelitian Simposium Pajak II, Madura : Universitas Trunojoyo)
- Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- _____, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- _____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

_____, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Penyampaian Kep. Dirjen Pajak No. KEP-173/PJ./2004 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP dengan Sistem E-Reg

_____, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak

_____, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

_____, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke tiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

_____, Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Saefullah, Entang. 2002. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Hubungannya dengan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi" (Tesis diajukan untuk mendapat gelar Magister Sains, Jakarta : Program Studi Ilmu Administrasi FISIP-UI)

Suharyadi, dan Purwanto SK., 2003. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

_____, 2004. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku II*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Wahana Komputer, Tim Penelitian dan Pengembangan. 2001. *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 10.0*. Semarang : Penerbit Salemba Infotek

Wijiraharjo. Tth. "Sejarah Perpajakan di Indonesia (Indonesian Tax History)", (Online), (<http://wijiraharjo.wordpress.com/2007/12/10/sejarah-perpajakan-indonesia-indonesian-tax-history/>), diakses 2 Februari 2010)

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan edisi 3*. Bandung : Penerbit Salemba Empat

LAMPDIRAN-LAMPDIRAN



500200

Lampiran 1 Surat Izin PKL / Magang Sekaligus Observasi dari Kantor Pusat DJP

Lampiran 2 Surat Keterangan PKL / Magang Sekaligus Observasi

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
MATRAMAN**

Jl. Matraman Raya No. 43
Jakarta Timur 13140

Telp. (021) 8566928 - 8566929
Fax. (021) 8566927

SURAT KETERANGAN

Nomor : S- 302 /WPJ.20/KP.0101/2009

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama	: RINAWATI
NPM/NIS	: 8335062792
Jurusan	: Akuntansi Reguler (S 1)
Tempat Magang	: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Jl. Matraman Raya No. 43 – Jakarta Timur

telah melaksanakan magang dalam rangka penyusunan skripsi pada kantor kami dari tanggal 01 Juli 2009 s/d 09 Oktober 2009

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 November 2009

a.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum

ISMARAHADI
NIP.060072764

Lampiran 3 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SR

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : 15-05-2009 08:30
Tanggal : 15-05-2009 08:30

Nama : PEMANU PEMERANG KAS CRYANG SEN PISANG...
Alamat : JL. PISANGAN BARU TENGAH, PISANGAN BARU
Jenis Pajak : SPT Tahunan Peral. 21 / 0-TRN - 030061531
Rabat/Status : Normal

FRIDA MULATI, SE
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
N.P.W.P : 00.441.042.9-001.000
No. P.K.P : 0 2008
Ms/Thn pajak : Diterima Dap.Bx. (Lokal)
Tgl. Terima : 25-03-2009

TEMPAT PELAYANAN TERPADU		Uraian		Prf / Tg	Uraian		Prf / Tg
Uraian	Prf/Tg	Diteruskan ke :			PENYIDIKAN		
Surat diterima : 1. langsung	1. Seksi :			1. Diberitahukan kepenuntut umum	
2. melalui pos	2. Diterima Seksi			2. Penyidikan	
		3. Selesai diproses			3. Selesai disidik	
					4. Disampaikan kepenuntut umum	
					PENETAPAN		
					1. STP	
					2. SKPN	
					3. SKPKB	
					4. SKPKBT	
					5. SKPLB	
					RESTITUSI		
					1. SKPKPP	
					2. SPMKP	
					PENGARSIPAN		
					1. Dimasukkan keinduk berkas	
					2. Diteruskan ke :	
					3. Diterima kembali	

SEKSI TERKAIT		PENGELOLAAN	
Uraian	Prf/Tg	Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :		PENGOLAHAN SPT	
1. Seksi :		1. Dicatat pada 1Q - 1	
2. Diterima Seksi		2. Selesai di-Edit	
3. Selesai diproses		3. Selesai direkam	8/10/09
Diteruskan ke :		4. Dicatat pada 1Q - 2	
1. Seksi :		PEMERIKSAAN	
2. Diterima Seksi		6. Lengkap	
3. Selesai diproses		7. Sederhana :	
Diteruskan ke :		7.1. Lapangan	
1. Seksi :		7.2. Kantor	
2. Diterima Seksi			
3. Selesai diproses			

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

021 8566923
021 8566927

Telepon :
Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 15-05-2009 08:30

Nama : PEMANU PEMERANG KAS CRYANG SEN PISANG...
Alamat : JL. PISANGAN BARU TENGAH, PISANGAN BARU
Jenis Pajak : SPT Tahunan Peral. 21
SPT Normal
Status : Normal
Nilai : 0-TRN
Rabat/Status : Normal

N.P.W.P : 00.441.042.9-001.000
No. P.K.P : 0 2008
Ms/Thn Pajak :
Nama BR : FRIDA MULATI, SE
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Petugas penerima,
FRIDA MULATI
030061531

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96

Lampiran 4 Output Perhitungan SPSS

1. Data Sebelum Ditransform dalam Bentuk Logaritma

Obs.	Y	X1	X2
1	5493088306	70	0
2	5698843960	78	0
3	8468534849	95	0
4	4228697002	82	0
5	4225397182	249	0
6	4015282972	1318	0
7	5158374039	811	0
8	4968496416	869	0
9	4464403416	3427	0
10	4450324350	1062	0
11	6076285026	1414	0
12	13949279256	450	0
13	6114970269	917	1
14	7483951172	827	1
15	11972312489	622	1
16	5843908272	367	1
17	8295906628	294	1
18	6303970808	233	1
19	5754375582	253	1
20	7754272488	425	1
21	6699026861	1676	1
22	6453180076	2791	1
23	6739062219	3617	1
24	10413888282	6433	1
25	7062006640	3334	1
26	7531670705	2843	1
27	12443141973	1681	1
28	10529210726	855	1
29	6462133196	525	1
30	6598878200	526	1
31	7364489580	635	1
32	6626616041	707	1
33	7152397544	357	1
34	6210907095	513	1
35	6715043813	855	1
36	12019804502	1747	1
37	7862301816	2452	1
38	6648597848	904	1
39	9359668089	936	1

2. Data Setelah Ditransform dalam Bentuk Logaritma

Obs.	Y	X1	X2
1	9.74	1.85	0
2	9.76	1.89	0
3	9.93	1.98	0
4	9.63	1.91	0
5	9.63	2.40	0
6	9.60	3.12	0
7	9.71	2.91	0
8	9.70	2.94	0
9	9.65	3.53	0
10	9.65	3.03	0
11	9.78	3.15	0
12	10.14	2.65	0
13	9.79	2.96	1
14	9.87	2.92	1
15	10.08	2.79	1
16	9.77	2.56	1
17	9.92	2.47	1
18	9.80	2.37	1
19	9.76	2.40	1
20	9.89	2.63	1
21	9.83	3.22	1
22	9.81	3.45	1
23	9.83	3.56	1
24	10.02	3.81	1
25	9.85	3.52	1
26	9.88	3.45	1
27	10.09	3.23	1
28	10.02	2.93	1
29	9.81	2.72	1
30	9.82	2.72	1
31	9.87	2.80	1
32	9.82	2.85	1
33	9.85	2.55	1
34	9.79	2.71	1
35	9.83	2.93	1
36	10.08	3.24	1
37	9.90	3.39	1
38	9.82	2.96	1
39	9.97	2.97	1

3. Output SPSS Pengujian Model Regresi Berganda Setelah Transform ke dalam Bentuk Logaritma

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.483 ^a	.234	.191	.11998	1.996

a. Predictors: (Constant), Dummy , jml_WP_baru_log

b. Dependent Variable: PPh_log

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.158	2	.079	5.489	.008 ^a
	Residual	.518	36	.014		
	Total	.676	38			

a. Predictors: (Constant), Dummy , jml_WP_baru_log

b. Dependent Variable: PPh_log

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.704	.118		81.963	.000		
	jml_WP_baru_log	.015	.043	.054	.344	.733	.880	1.136
	Dummy	.132	.044	.462	2.973	.005	.880	1.136

a. Dependent Variable: PPh_log

4. Output SPSS Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.211 ^a	.044	-.009	.07691	2.234

a. Predictors: (Constant), Dummy , jml_WP_baru_log

b. Dependent Variable: abs

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.010	2	.005	.835	.442 ^a
	Residual	.213	36	.006		
	Total	.223	38			

a. Predictors: (Constant), Dummy , jml_WP_baru_log

b. Dependent Variable: abs

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.085	.076		1.125	.268		
	jml_WP_baru_log	.009	.028	.059	.340	.736	.880	1.136
	Dummy	-.037	.028	-.224	-1.288	.206	.880	1.136

a. Dependent Variable: abs

Lampiran 5 Data Penerimaan Pajak Tahun 2007-Maret 2010

Lampiran 6 Data Jumlah WP Baru Terdaftar Tahun 2007 hingga Maret 2010

Lampiran 7 *Data Sunset Policy*

Lampiran 8 Tabel Uji Durbin-Watson

dl dan du dengan *level of significant* 5 %

n	k = 1		k = 2		k = 3		k = 4		k = 5	
	du	dl	du	dl	du	dl	du	dl	du	dl
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75	0,69	1,97	0,56	2,22
16	1,10	1,37	0,95	1,54	8,86	1,73	0,74	1,93	0,62	2,15
17	1,13	1,38	1,02	1,54	0,90	1,71	0,78	1,8	0,67	2,02
18	1,16	1,39	1,05	1,53	0,93	1,69	0,87	1,87	0,71	1,99
19	1,18	1,40	1,08	1,53	0,97	1,68	0,86	1,85	0,75	1,96
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,65	0,98	1,83	0,79	1,94
21	1,22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,67	0,93	1,81	0,83	1,92
21	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,90
23	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,80	1,89
24	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,88
25	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1,04	1,77	0,95	1,86
26	1,30	1,46	1,22	1,55	1,14	1,65	1,06	1,76	0,98	1,85
27	1,32	1,47	1,24	1,56	1,16	1,65	1,08	1,76	1,01	1,84
28	1,33	1,48	1,26	1,56	1,18	1,65	1,10	1,75	1,03	1,83
29	1,34	1,48	1,27	1,56	1,20	1,65	1,12	1,74	1,05	1,83
30	1,33	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65	1,14	1,74	1,07	1,82
31	1,36	1,50	1,30	1,57	1,23	1,65	1,16	1,74	1,09	1,81
32	1,37	1,50	1,31	1,57	1,24	1,65	1,18	1,73	1,11	1,81
33	1,38	1,51	1,32	1,58	1,26	1,65	1,19	1,73	1,13	1,80
34	1,39	1,51	1,33	1,58	1,27	1,65	1,21	1,73	1,15	1,80
35	1,40	1,52	1,34	1,58	1,28	1,65	1,22	1,73	1,16	1,80
36	1,41	1,52	1,35	1,59	1,29	1,65	1,24	1,73	1,18	1,79
37	1,42	1,51	1,36	1,59	1,31	1,66	1,25	1,72	1,19	1,79
38	1,43	1,54	1,37	1,59	1,32	1,66	1,26	1,72	1,21	1,79
39	1,43	1,54	1,38	1,60	1,33	1,66	1,274	1,72	1,22	1,77
40	1,44	1,54	1,39	1,60	1,34	1,66	1,29	1,72	1,23	1,77
45	1,48	1,57	1,43	1,62	1,38	1,67	1,34	1,72	1,29	1,77
50	1,50	1,59	1,46	1,63	1,42	1,67	1,38	1,72	1,34	1,77
55	1,53	1,60	1,49	1,64	1,45	1,68	1,41	1,72	1,38	1,77
60	1,55	1,62	1,51	1,65	1,48	1,69	1,44	1,73	1,41	1,77
65	1,57	1,63	1,54	1,66	1,50	1,70	1,47	1,73	1,44	1,77
70	1,58	1,64	1,55	1,67	1,52	1,70	1,49	1,74	1,46	1,77
75	1,60	1,65	1,57	1,68	1,54	1,71	1,51	1,74	1,49	1,77
80	1,61	1,66	1,59	1,69	1,56	1,72	1,54	1,74	1,51	1,77
85	1,62	1,67	1,60	1,70	1,57	1,72	1,55	1,75	1,52	1,77
90	1,63	1,68	1,61	1,70	1,59	1,73	1,57	1,75	1,54	1,78
95	1,64	1,69	1,62	1,71	1,60	1,73	1,58	1,75	1,56	1,78
100	1,65	1,69	1,63	1,72	1,61	1,74	1,59	1,76	1,57	1,78

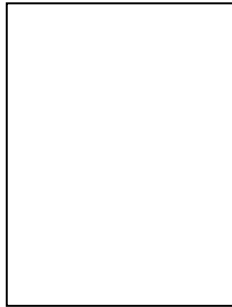
Lampiran 9 Tabel Uji F dengan Tingkat Signifikansi 5 %

		Derjat Bebas Pembilang													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	40	
D E R A J A T B E B A S P E N Y E B U T	1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	246	248	251	
	2	18,5	19	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5
	3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,7	8,66	8,59	
	4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6	5,69	5,86	5,80	5,72	
	5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,62	4,56	4,46	
	6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	3,94	3,87	3,77	
	7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,51	3,44	3,34	
	8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,5	3,44	3,39	3,35	3,22	3,15	3,04	
	9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,01	2,94	2,83	
	10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,85	2,77	2,66	
	11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,2	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,72	2,65	2,53	
	12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3	2,91	2,85	2,80	2,75	2,62	2,54	2,43	
	13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,53	2,46	2,34	
	14	4,6	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,46	2,39	2,27	
	15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,9	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,40	2,33	2,20	
	16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,35	2,28	2,15	
	17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,31	2,23	2,10	
	18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,27	2,19	2,06	
	19	4,38	3,52	3,13	2,97	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,23	2,16	2,03	
	20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,2	2,12	1,99	
	21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,18	2,10	1,96	
	22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,15	2,07	1,94	
	23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,13	2,05	1,91	
	24	4,26	3,4	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,11	2,03	1,89	
	25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,09	2,01	1,87	
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,01	1,93	1,79		
40	4,08	3,23	2,61	2,61	2,45	2,34	2,10	2,18	2,12	2,08	1,92	1,84	1,69		
60	4	3,15	2,53	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,84	1,75	1,59		
∞	3,84	3	2,6	2,37	2,2	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,67	1,57	1,39		

Lampiran 10 Tabel Uji Parsial t-test

Derajat Bebas (df)	Luas Ekor (Uji Satu Arah)					
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
	Luas Ekor (uji Dua Arah)					
	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.82	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.699	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.684	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.671	2.042	2.457	2.750	3.551
40	1.303	1.662	2.021	2.423	2.704	3.460
60	1.296	1,658	2,000	2,390	2,660	3,373
“	1.282	1.645	1.960	2.358	2.617	3.291

RIWAYAT HIDUP



Rinawati, lahir di Jakarta tahun 1988. Anak pertama dari pasangan Bapak Soewarto dan Ibu Juwati. Pendidikan formalnya dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Bentara Indonesia I (tamat tahun 1994), yang dilanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri Cipinang Muara 01 Pagi sering menduduki peringkat sepuluh besar di kelasnya (lulus tahun 2000). Setelah itu, melanjutkan pendidikan setingkat SLTP di MTs. Negeri 6 Cipinang pernah menduduki peringkat satu di sekolah dan mendapatkan beasiswa (lulus tahun 2003). Lalu, melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 53 Jakarta Timur dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), sering menduduki peringkat lima besar di kelasnya dan lulus tahun 2006.

Prestasi yang pernah dicapai yaitu : juara III lomba menyanyi bersama tingkat TK se-kecamatan Jatinegara (tahun 1994), juara I cerdas cermat lomba keterampilan agana (LOKETA) tingkat wilayah binaan IX (tahun 1999), juara I cerdas cermat LOKETA tingkat kec. Jatinegara (tahun 1999), juara I lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) antarsiswa TPA Al-Iman unit 070 (tahun 1999), dan sebagai perwakilan The best Student English Selection Oxford Course Indonesia cabang Cipinang Jaya (tahun 2002).

Setelah lulus SLTA di tahun 2006, melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pengalaman

kerja yang pernah dilaluinya, antara lain bekerja *parttime* pada perusahaan CV. Mitra Utama Global (tahun 2009), bergabung sebagai staf pengajar tingkat SD pada bimbingan belajar Al Rasyid cabang National English Center (NEC) Kayu Manis (tahun 2009), dan magang selama tiga bulan di seksi Pengolahan Data dan Informasi (seksi PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sebagai staf pelaksana Sekretaris PDI (tahun 2009). Skripsi ini merupakan hasil karyanya sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi FE UNJ di tahun 2010 ini.